



Pemerintah Kabupaten
Polewali Mandar

LAKIP

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

2022

DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA
STATISTIK PERSANDIAN

IKHTISAR EKSEKUTIF

Penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan perwujudan pertanggungjawaban dan komitmen organisasi mengimplementasikan paradigma Pemerintahan Berorientasi Hasil. Melalui Laporan ini publik, instansi dan di internal organisasi dapat melakukan evaluasi dan penilaian terhadap keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran-sasaran strategis organisasi, sehingga pada masa mendatang dapat dilakukan upaya-upaya perbaikan kebijakan, strategi dan aksi untuk hasil yang lebih optimal.

Terdapat 4 (empat) sasaran strategis Dinas KominfoSP Tahun 2022, dengan capaian Sebagai berikut :

SASARAN STRATEGIS DAN INDIKATOR	TARGET	REALISASI	%
Meningkatnya Kualitas Keterbukaan Informasi Publik Indikator : Predikat Keterbukaan Informasi Publik	Menuju Informatif (88,00)	Menuju Informatif (92,38)	104,9
Meningkatnya Kapabilitas Proses dan Fungsi Teknis Pemerintahan Berbasis Elektronik Indikator : Tingkat Kematangan Kapabilitas Proses dan Fungsi Teknis SPBE	Terstandarisasi Transaksi	Terstandarisasi Kolaborasi	123,6
Meningkatnya Kualitas Data Statistik Sektoral Indikator : Persentase Data Sektoral Yang Memenuhi Standar Data Dan Dapat Diakses Secara Online	77	79,27	102,9
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Perangkat Daerah Indikator : Predikat SAKIP Perangkat Daerah	A (83,00)	A (85,94)	103,54
Indikator : Persentase Tertib Pengelolaan Keuangan Dan Aset Perangkat Daerah	100%	100%	100
Indikator : Indeks Pengguna Layanan Perangkat Daerah	Sangat Baik 97,05	Sangat Baik 98,79	101,7
			106,11%

Untuk pencapaian sasaran tersebut telah dialokasikan anggaran tahun 2022 sebesar **Rp 4.831.471.611,-** dan terealisasi **Rp 4.755.094.724,-** atau persentase realisasi **98,42%**. Capaian kinerja Dinas KominfoSP Tahun 2020, secara keseluruhan dapat dinyatakan "berhasil". Hal ini ditunjukkan dengan Rata-rata pencapaian kinerja sasaran strategis Dinas KominfoSP sebesar **106,11%** serta capaian kinerja keuangan sebesar **98,42%**. Kondisi ini memperlihatkan Dinas KominfoSP berhasil melakukan efisiensi penggunaan dana sebesar **6,57%**.





KATA PENGANTAR

Laporan Akuntabilitas Kinerja

Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian ini disusun sebagai perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian sasaran strategis Dinas Tahun 2022.

Laporan ini pula sebagai bentuk komitmen Dinas KominfoSP mengimplementasikan paradigma **Pemerintahan Berorientasi Hasil**.

Dalam penyusunannya, diungkapkan aspek perencanaan kinerja berupa sasaran strategis, indikator outcome dan target kinerja yang diperjanjikan. Dalam pengukurannya, diungkapkan perbandingan realisasi dengan target, perbandingan dengan capaian tahun-tahun sebelumnya, perbandingan dengan target jangka menengah yang tertian dalam Renstra 2019-2024, analisis efisiensi, keberhasilan atau kegagalan dilengkapi faktor penunjang, kendala serta solusi yang diupayakan serta aspek akuntabilitas keuangan.

Dengan demikian, Laporan ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan penilaian keberhasilan dan kegagalan Dinas KominfoSP dalam pencapaian sasaran-sasaran strategis organisasi, sehingga pada masa mendatang dapat dilakukan upaya-upaya perbaikan kebijakan, strategi dan aksi untuk hasil yang lebih optimal.

Semoga dengan Laporan Akuntabilitas Kinerja ini, seluruh jajaran aparatur Dinas KominfoSP

semakin memantapkan komitmen dan perannya untuk berkolaborasi meningkatkan efisiensi, efektifitas, dan produktifitas kinerja pada tahun-tahun selanjutnya.

Kepala Dinas Kominfo SP

I Nengah Tri Sumadana, AP, M.Si





Daftar Isi

BAB I PENDAHULUAN	8
A. Umum	8
B. Tugas dan Fungsi Organisasi	10
C. Isu Strategis Organisasi	11
BAB II PERENCANAAN KINERJA	13
A. Rencana Strategis	13
B. Perjanjian Kinerja 2022	15
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	18
A. Capaian Kinerja Tahun 2022	18
B. Akuntabilitas Keuangan	57
BAB IV PENUTUP	59
LAMPIRAN	

Daftar Gambar, Chart dan Tabel

Gambar 1.1	Struktur Organisasi Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian	10
Gambar 2.1	Tujuan dan Sasaran Strategis Dinas Kominfo SP, Tahun 2019-2024	13
Gambar 3.1	Rapat Koordinasi Implementasi Standar Layanan Informasi Publik Pada Organisasi Perangkat Daerah	31
Gambar 3.2	Pendampingan Pemanfaatan Akun Email Polmankab.go.id Dalam Rangka Optimalisasi Pemanfaatan Sertifikat Elektronik dan Pemanfaatan Aplikasi Srikandi.	43
Gambar 3.3	Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kab. Polewali Mandar Dirangkaikan Penganugerahan Data Award Tahun 2022	47
Gambar 3.4	Apresiasi Capaian Akuntabilitas Kinerja Tahun 2021 (Predikat A) Kepada Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian	50
Gambar 3.5	Apresiasi Capaian Pelayanan Publik Tahun 2021 (Predikat Sangat Baik) Kepada Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian	56
Tabel. 2.1	Tujuan dan Sasaran Strategis Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Tahun 2019-2024	14

Tabel 2.2	Program dan Alokasi Anggaran Tahun 2022	16
Tabel 3.1	Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis I Tahun 2022	28
Tabel 3.2	Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis II Tahun 2022	31
Tabel 3.3	Tingkat Kematangan Kapabilitas Proses dan Tingkat Kematangan Pada Kapabilitas Fungsi Teknis SPBE Kab. Polewali Mandar Tahun 2022	33
Tabel 3.4	Pemetaan Fungsi-Fungsi Utama Pemerintahan yang Telah Didukung Teknologi Sistem Informasi	35
Tabel 3.5	Penataan Bandwith Pemerintah Daerah Tahun 2020-2022	38
Tabel 3.6	Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis III Tahun 2022	44
Tabel 3.7	Pemenuhan Data Sektoral Organisasi Perangkat Daerah Tahun 2022	45
Tabel 3.8	Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis IV Tahun 2022	48
Tabel 3.9	Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis IV Tahun 2022	51
Tabel 3.10	Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis IV Tahun 2022	53
Tabel 3.11	Hasil Survei Kepuasan Pelayanan Dinas KominfoSP Tahun 2022	54
Tabel 3.12	Nilai Efisiensi pada Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Dinas KominfoSP Tahun 2022	57
Chart 3.1	Perbandingan Capaian Kinerja Keterbukaan Informasi Publik Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2022 Target dengan Realisasi 2020, 2022-2021 dan Target Renstra (akhir)	29
Chart 3.2	Perbandingan Indeks SPBE Pemerintah Kab. Polewali Mandar Tahun 2021-2022	32
Chart 3.3	Target dan Realisasi Kinerja Tingkat Kematangan Kapabilitas Proses dan Tingkat Kematangan Pada Kapabilitas Fungsi Teknis SPBE Kab. Polewali Mandar Tahun 2022.....	34
Chart 3.4	Peningkatan Kapasitas Bandwitch Tahun 2020-2021	41
Chart 3.5	Pertumbuhan Menara Telekomunikasi Tahun 2020 s.d. 2022	41
Chart 3.6	Perbandingan Capaian Kinerja Kualitas Data Statistik Daerah Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2022 Target dengan Realisasi 2022, 2020-2021 dan Target Renstra (akhir)	44
Chart 3.7	Perkembangan Implementasi SAKIP Dinas KominfoSP Tahun 2020-2022	49
Chart 3.8	Perbandingan Capaian Kinerja Pengelolaan Keuangan dan Aset Dinas KominfoSP Tahun 2022, Serta Perbandingan Target Dengan Realisasi 2022,2020-2021 Dan Target Renstra (akhir).....	51
Chart 3.9	Perbandingan Capaian Kinerja Kepuasan Pelayanan Publik Dinas KominfoSP Tahun 2022 serta Perbandingan Target dengan Realisasi 2022, 2020-2021 dan Target Renstra (akhir)	55
Chart 3.10	Alokasi dan Realisasi Anggaran Dinas KominfoSP Tahun 2022	57

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Umum

1. latar belakang

Salah satu tuntutan publik pada saat ini adalah terselenggaranya pemerintahan yang baik (Good Governance), sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasilguna, bersih dan bertanggung-jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Berkaitan dengan hal ini, diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan terukur yaitu Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagai suatu sistem pemerintahan yang mengacu pada peningkatan kinerja yang berorientasi pada hasil.

Melalui SAKIP ini, disusun perencanaan kinerja yang focus pada permasalahan utama pemerintahan atau organisasi serta berorientasi pada perbaikan pencapaian sasaran kinerja yang terukur. Rencana Kinerja yang telah ditetapkan tersebut selanjutnya diukur pencapaiannya secara berkala serta mengidentifikasi permasalahan dan solusi jangka pendek dan jangka panjang yang dapat diupayakan untuk memastikan tercapainya sasaran. Pada setiap tahun kinerja berakhir, maka entitas SAKIP wajib menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja dan diikuti dengan review dan evaluasi terhadap implementasi SAKIP dan pencapaian kinerja sebagai bahan perbaikan implementasi SAKIP pada tahun-tahun selanjutnya.

Sehubungan dengan telah berakhirnya tahun anggaran 2022 dan sebagaimana diamanahkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian (Dinas KominfoSP) sebagai entitas SAKIP wajib menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Dalam Penyusunan Laporan ini, diungkapkan capaian kinerja organisasi yang membandingkan antara target dengan realisasi, realisasi kinerja tahun berkenaan dengan tahun-tahun sebelumnya, keberhasilan dan kegagalan serta efisiensi sumber daya yang berhasil dilakukan dan akuntabilitas keuangan.





2. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan

Penyusunan LAKIP Dinas KominfoSP Tahun 2022 dimaksudkan untuk menyediakan dan memberikan informasi terkait pencapaian kinerja secara terukur dengan memberikan perbandingan dengan target yang telah ditetapkan sebelumnya, perbandingan dengan kinerja tahun-tahun sebelumnya, keberhasilan dan kegagalan, serta efisiensi sumber daya dan akuntabilitas keuangan.

Tujuan yang diharapkan melalui penyusunan LAKIP ini adalah tersedianya bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja organisasi selanjutnya dengan mencermati berbagai kendala dan permasalahan yang masih dihadapi dalam pencapaian kinerja organisasi yang telah ditetapkan.

3. Dasar Hukum

Dasar hukum dalam penyusunan LAKIP Dinas KominfoSP Tahun 2022 ini, sebagai berikut :



Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme;



Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;



Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;



Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Review Atas Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah;



Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Polewali Mandar.



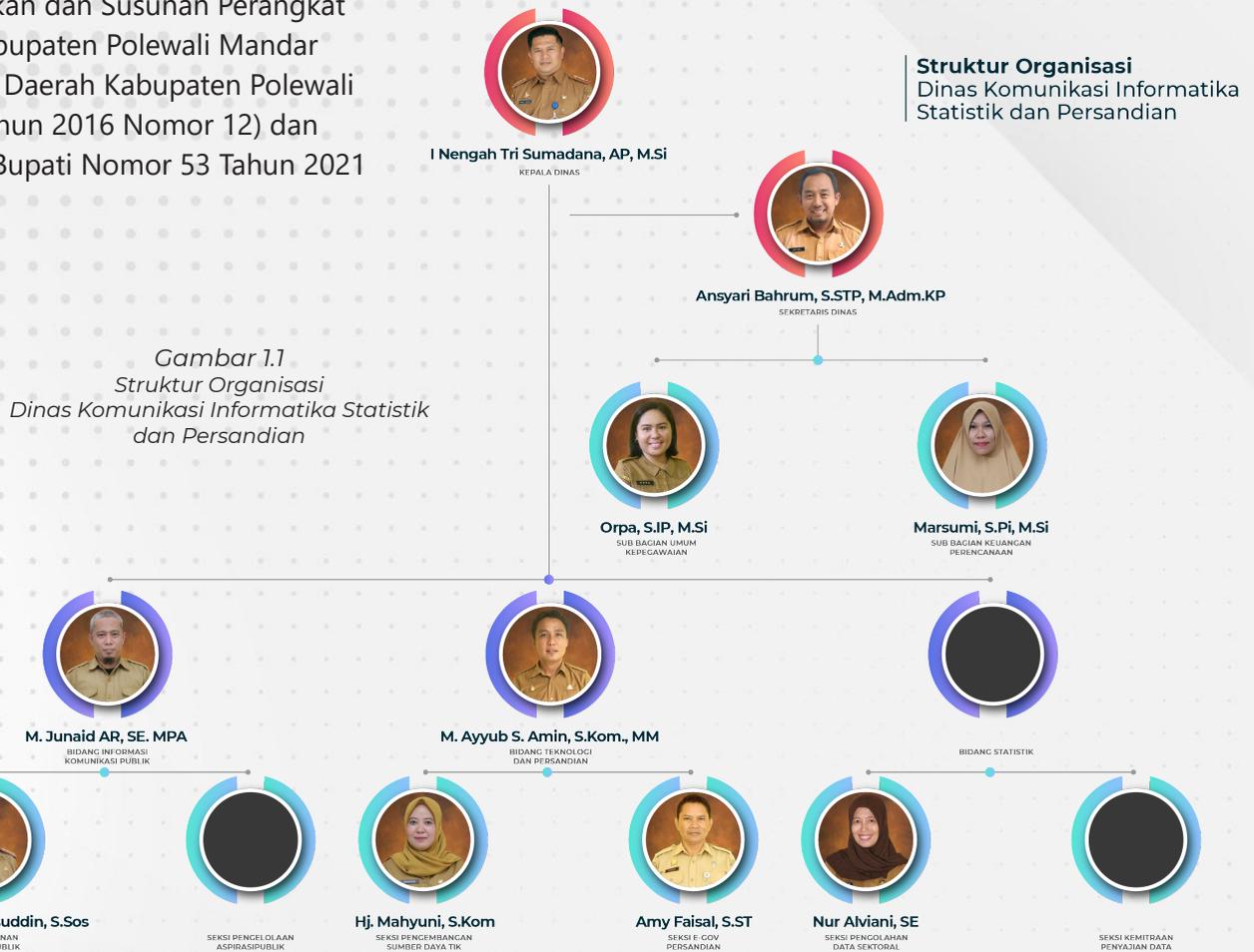
Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah.



B. Tugas dan Fungsi Organisasi

Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Polewali Mandar dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2016 Nomor 12) dan Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2021

tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah merupakan **unsur pelaksana** urusan Komunikasi dan Informatika, Statistik serta Persandian dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.



Dalam Peraturan Bupati tersebut, tugas pokok Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Polewali Mandar adalah melaksanakan kewenangan otonomi daerah dalam bidang Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian yang menjadi tanggung jawabnya dan tugas perbantuan yang diberikan Pemerintah Pusat, serta membantu Bupati dalam urusan komunikasi statistik dan persandian yang menjadi kewenangan daerah. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Polewali Mandar mempunyai **fungsi** sebagai berikut :

- 01

Perumusan kebijakan Komunikasi dan Informatika, Statistik serta Persandian
- 02

Pelaksanaan kebijakan Komunikasi dan Informatika, Statistik serta Persandian
- 03

Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Komunikasi dan Informatika, Statistik serta Persandian
- 04

Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya serta Persandian
- 05

Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya serta Persandian

C. Isu Strategis Organisasi

Identifikasi isu-isu strategis yang terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas KominfoSP dapat diuraikan sebagai berikut :

1). Rendahnya kualitas Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik

Hingga saat ini, kualitas Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Kabupaten Polewali Mandar masih berada dalam kategori sedang. Hal ini disebabkan oleh sejumlah faktor, sebagai berikut :

Belum optimalnya implementasi Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR). Hal ini disebabkan oleh belum optimalnya pemahaman Perangkat Daerah terkait pengelolaan LAPOR.

Belum optimalnya publikasi kegiatan perangkat daerah sebagai bagian dari penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Hal ini terlihat dari kurangnya publikasi kegiatan perangkat daerah pada masing-masing web. Hal ini dipengaruhi oleh belum terbangunnya standar dan sistem prosedur layanan peliputan dan publikasi kegiatan perangkat daerah dan belum optimalnya koordinasi dan kerjasama publikasi dengan perangkat daerah. Disisi lain media publikasi yang dapat dijangkau oleh Dinas hanya memanfaatkan Media Sosial dan Media Majalah Warta KominfoSP yang cakupan akses masyarakat terhadap informasi public tersebut terbatas pada masyarakat pengguna media sosial.

Belum optimalnya pemanfaatan e-PPID dan website Perangkat Daerah. Hal ini disebabkan belum optimalnya pemahaman Perangkat Daerah terkait pengelolaan informasi dan komunikasi publik.

2). Rendahnya kualitas Pemanfaatan Teknologi Informasi dan persandian Daerah.

Hingga saat ini, cakupan fungsi-fungsi utama pemerintahan yang berbasis teknologi Informasi Komunikasi dan Persandian hanya sebesar 54%. Sejumlah faktor yang menyebabkan kondisi tersebut, antara lain :

Belum optimalnya Data Center sebagai fasilitas yang digunakan untuk penempatan sistem elektronik dan komponen terkait lainnya untuk keperluan penempatan, penyimpanan, pengolahan data dan pemulihan data.

Belum memadainya kapasitas bandwidth perangkat daerah sehingga kecepatan akses dan pengiriman data tidak maksimal

Aplikasi Umum dan Aplikasi Khusus yang ada dan digunakan Perangkat Daerah saat ini belum terpadu dan belum memenuhi standar dan masih berada di level 2 (dua) baik dari aspek kematangan kapabilitas proses yang berada pada level terkelola maupun kematangan pada kapabilitas fungsi yang berada pada level interaksi.

Pemerintah Daerah belum menerapkan keamanan informasi yang memadai sebagaimana diamanahkan dalam Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

3). Rendahnya kualitas Data Sektoral

Hingga saat ini data-data sektoral yang dianggap valid dan memadai adalah data-data yang tersedia pada Polewali Mandar Dalam Angka yang dikeluarkan oleh BPS, namun data ini hanya menyajikan keadaan 1 (satu) tahun sebelumnya, sehingga dari aspek kekinian masih dianggap belum update. Perangkat Daerah belum mengelola data sektoral dengan baik, hal ini dapat dilihat dari data yang dibutuhkan belum dapat disediakan dalam waktu singkat, data belum dapat diakses secara luas dan mudah, data belum terstandarisasi, metadata belum tersedia, dan interoperabilitas data belum terbangun. Kondisi ini disebabkan oleh sejumlah faktor, sebagai berikut :

Belum terbangunnya tata kelola data sektoral;

Belum adanya forum koordinasi data;

Belum optimalnya Perangkat Daerah dalam melakukan penyediaan data; dan

Belum optimalnya pemanfaatan aplikasi dalam penginputan data Perangkat Daerah;



BAB 2

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

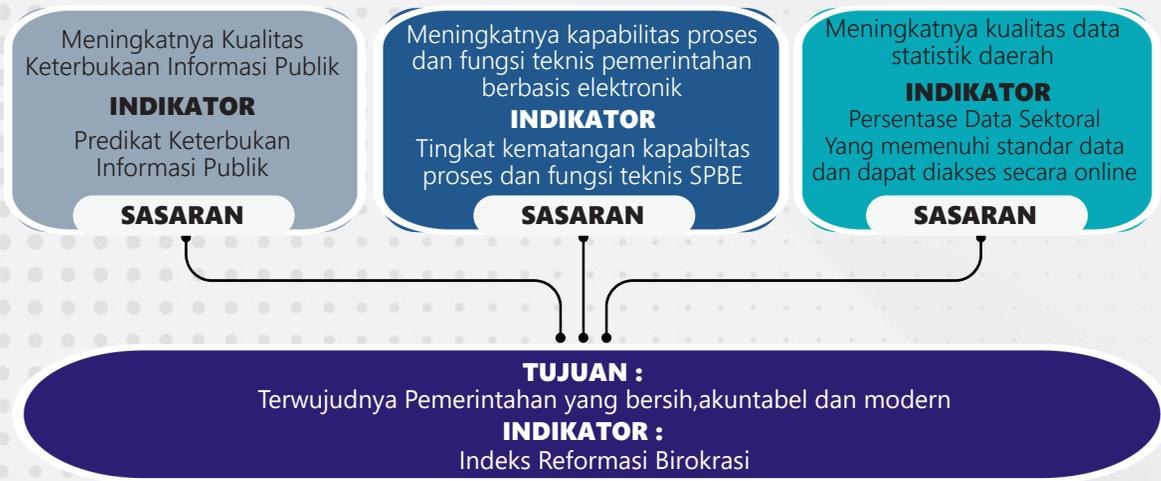
Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2019-2024, maka Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian (KominfoSP) Kabupaten Polewali Mandar menyusun Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2019-2024. Renstra dimaksud berkedudukan sebagai dokumen perencanaan yang merupakan penjabaran dari RPJMD di tingkat Perangkat Daerah untuk periode 5 (Lima) tahun, yang memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan serta pendanaan indikatif dan dilengkapi dengan tolok ukur pencapaiannya yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah.

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahunan, sedangkan Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/ Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian outcome program Perangkat Daerah. Berpedoman pada Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2019-2024 serta memperhatikan permasalahan dan isu strategis serta faktor penghambat dan pendorong, maka Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Tahun 2019-2024, dirumuskan sebagai berikut :

Gambar 2.1

Tujuan dan Sasaran Strategis Dinas Kominfo SP, Tahun 2019-2024





Untuk mengetahui dan mengukur capaian Tujuan dan Sasaran Strategis dimaksud, maka perlu menentukan indikator kinerja Tujuan dan Sasaran. Penentuan indikator kinerja tersebut menggunakan kriteria SMART-C yaitu : specific (jelas), measurable (dapat diukur), agreeable (dapat disetujui), realistic (dapat dicapai), time bounded (memiliki batas waktu pencapaian) dan continuously improved (perbaikan berkelanjutan). Indikator kinerja tujuan dan sasaran merupakan indikator di level outcome (hasil). Indikator Sasaran Strategis dimaksud selanjutnya merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU). Di samping IKU dimaksud, disusun pula indikator sasaran strategis penunjang pencapaian IKU.

Dengan mengamati kondisi saat ini dan mempertimbangkan potensi sumber daya yang dimiliki serta peluang dan kekuatan yang ada, maka ditetapkan pencapaian target pencapaian Tujuan dan Sasaran Strategis Organisasi melalui Forum Rapat Bersama, dengan penentuan target sebagai berikut :

Tabel 2.1
Tujuan dan Sasaran Strategis Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Tahun 2019-2024

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Target Kinerja Tujuan/ Sasaran pada Tahun ke-					
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
1. Terwujudnya Pemerintahan Yang Bersih, Akuntabel dan Modern		Indeks SPBE	2,61	2,65	2,75	2,85	3,01	3,17
	Meningkatnya Kualitas Keterbukaan Informasi Publik	Predikat Keterbukaan Informasi Publik	Cukup Informatif	Menuju Informatif	Menuju Informatif	Menuju Informatif	Menuju Informatif	Informatif
	Meningkatnya kualitas data statistik sektoral	Persentase Data Sektoral yang memenuhi standar data dan dapat diakses secara online	40,37%	66,38%	70%	77%	79,50%	82%
	Meningkatnya kapabilitas proses dan fungsi teknis pemerintahan berbasis elektronik	Tingkat kematangan kapabilitas proses dan fungsi teknis SPBE	Terkelola Informasi	Rintisan Transaksi	Terkelola Transaksi	Terstandarisasi Transaksi	Terstandarisasi Kolaborasi	Terstandarisasi Kolaborasi
		Predikat SAKIP Perangkat Daerah	B	BB	A	A	A	A
		Persentase tertib pengelolaan keuangan dan asset Perangkat Daerah	93,33	95,56	97,78	100	100	100
	Meningkatnya kualitas tata Kelola pemerintahan Perangkat Daerah	Indeks pengguna pelayanan public Perangkat Daerah	Baik	Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik

B. Perjanjian Kinerja 2022

Perjanjian Kinerja pada dasarnya merupakan pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola. Tujuan khusus perjanjian kinerja antara lain untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur dan sebagai dasar pemberian penghargaan (Reward) dan Sanksi (Punishment).

Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian telah menyusun Penetapan Kinerja Tahun 2022 sesuai dengan kedudukan, tugas, dan fungsi yang ada, dan merupakan tolok ukur evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir Tahun 2022. Perjanjian Kinerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Tahun 2022, sebagai berikut :



SASARAN STRATEGIS 1 :

Meningkatnya Kualitas Keterbukaan Informasi Publik

Indikator : Predikat Keterbukaan Informasi Publik

Target : Menuju Informatif



SASARAN STRATEGIS 2 :

Meningkatnya Kapabilitas Proses dan Fungsi Teknis Pemerintahan Berbasis Elektronik

Indikator : Tingkat Kematangan Kapabilitas Proses dan Fungsi Teknis SPBE

Target : Terstandarisasi-Transaksi



SASARAN STRATEGIS 3 :

Meningkatnya Kualitas Data Statistik Sektor

Indikator : Persentase Data Sektor Yang Memenuhi Standar Data dan Dapat Diakses Secara Online

Target : 77%



SASARAN STRATEGIS 4 :

Meningkatnya Kualitas Manajemen Perkantoran

Indikator : Predikat SAKIP Perangkat Daerah

Target : A

Indikator : Persentase tertib pengelolaan keuangan dan asset Perangkat Daerah

Target : 100%

Indikator : Indeks Pengguna Pelayanan Publik Perangkat Daerah

Target : Sangat Baik

Untuk mencapai sasaran tersebut, Dinas KominfoSP Tahun 2022 mengagendakan sejumlah Program dengan alokasi anggaran masing-masing sebagai berikut :

Tabel 2.2
Program dan Alokasi Anggaran Tahun 2022

Sasaran Strategis	Program	Anggaran
Meningkatnya Kualitas Keterbukaan Informasi Publik	Program Informasi dan Komunikasi Publik	Rp. 391.285.100,-
Meningkatnya Kapabilitas Proses dan Fungsi Teknis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Program Aplikasi Informatika	Rp. 1.385.240.100,-
	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Rp. 16.746.700,-
Meningkatnya Kualitas Data Statistik Sektoral	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Rp. 159.450.900,-
Meningkatnya Kualitas Manajemen Perkantoran	Program Manajemen Perkantoran	Rp. 2.878.748.811,-
Jumlah		Rp.4.831.471.611,-





BAB 3 AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Tahun 2022

Pengukuran pencapaian kinerja Dinas KominfoSP tahun 2022 dilakukan dengan cara membandingkan rencana target kinerja dengan realisasi, kemudian membandingkan capaian kinerja tahun 2022 dengan capaian kinerja pada tahun-tahun sebelumnya, dan membandingkan dengan target jangka menengah

yang tertuang dalam Renstra Dinas KominfoSP Tahun 2019-2024. Pada bagian ini diungkapkan pula analisis keberhasilan atau kegagalan pencapaian target, kendala yang dihadapi, analisis efisiensi sumber daya yang dilakukan serta program dan kegiatan yang menunjang pencapaian kinerja.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

SERTA APRESIASI ATAS CAPAIAN
AKUNTABILITAS KINERJA DAN PELAYANAN PUBLIK TAHUN 2021





SASARAN STRATEGIS 1 :

Meningkatnya Kualitas Keterbukaan Informasi Publik

Indikator : Predikat Keterbukaan Informasi Publik

Target : Menuju Informatif (88,00)

Undang-undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang diikuti dengan peraturan pelaksanaannya sebagaimana tertuang dalam PP Nomor 61 Tahun 2010 yang mengisyaratkan pentingnya membangun keterbukaan informasi publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar. Disamping regulasi dimaksud, keterbukaan informasi juga merupakan bagian penting dalam rangka menumbuhkan kepercayaan publik terhadap tata kelola pemerintahan daerah yang pada akhirnya akan menumbuhkan partisipasi publik dan berdampak pula pada pertumbuhan investasi di daerah.

Untuk mengetahui kualitas keterbukaan informasi publik, maka Pemerintah Daerah dapat berpedoman pada Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik. Berdasarkan ketentuan tersebut, setiap tahun Komisi Informasi Pusat dan Propinsi menyelenggarakan monitoring dan evaluasi pengelolaan informasi publik dan ditindaklanjuti dengan pemberian predikat keterbukaan informasi publik.

Sehubungan dengan Komisi Informasi Propinsi Sulawesi Barat belum pernah menyelenggarakan monitoring dan evaluasi terkait implementasi keterbukaan informasi publik, maka Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar, melalui Dinas KominfoSP melakukan monitoring dan evaluasi secara mandiri, dengan mengacu pada Peraturan Komisi Informasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Metode dan Tehnik Evaluasi Keterbukaan Informasi Badan Publik. Berdasarkan hasil pengisian Kuisisioner Mandiri, maka predikat keterbukaan informasi publik, diklasifikasikan sebagai berikut :

- nilai 97 – 100 : Informatif
- nilai 80 – 96 : Menuju Informatif
- nilai 60 – 79 : Cukup Informatif
- nilai 40 – 59 : kurang informatif
- nilai < 39 : tidak informatif

Penilaian dan pembobotan terhadap implementasi keterbukaan informasi publik, dilaksanakan sebagai berikut :

Nomor	Variabel Penilaian	Persentase
1	Pengumuman melalui Website	25%
2	Pelayanan Informasi 2.1 - Informasi Wajib berkala 2.2 - Informasi Tersedia Setiap Saat 2.3 - Daftar Informasi Publik dan Informasi Dikecualikan	30%
3	Pendokumentasian	25%
4	Pelayanan Informasi	20%
	Total	100%

Penilaian dan pembobotan terhadap implementasi keterbukaan informasi publik, dilaksanakan sebagai berikut :

a). Pengumuman Melalui Website

No.	Pernyataan	Kondisi Tahun 2022	NILAI
1	Aksesabilitas Website		
1,1	Memiliki web/situs/porta/khusus PPID/	www.ppid.polmankab.go.id	100
1,2	Mengumumkan informasi visi dan misi Badan Publik	Ada Lengkap	100
1,3	Mengumumkan program dan kegiatan yang sedang dijalankan badan publik tahun 2022	RPJMD 2019 RKPD 2021	100
1,4	Mengumumkan informasi terkait tugas dan fungsi Badan Publik	Ringkasan APBD 2021 Ada Lengkap	100
2	Konten		
2,1	Mengumumkan Informasi mengenai Profil singkat PPID, struktur dan tugas PPID	Ada Lengkap	100
2,2	Tata Cara Permohonan Informasi, Pengajuan Keberatan dan Penyelesaian Sengketa Informasi di Komisi Informasi	Ada Lengkap	100
2,3	Portal PPID memiliki (kanal) Regulasi berkenaan Peraturan mengenai Keterbukaan Informasi Publik dan atau Peraturan Lain	Ada Lengkap	100
2,4	Portal PPID Saudara memiliki aplikasi/tool yang dapat menerima Permohonan Informasi dan pengajuan Keberatan secara online	Ada Lengkap	100
2,5	Memiliki saluran akun PPID media sosial (Twitter/Instagram/Youtube/Facebook)	Ada Sebagian	50
2,6	Mengaktifkan kolom komentar pada setiap konten informasi yang diunggah	Ada Lengkap	100
2,7	Mengumumkan Daftar Informasi Publik berkala, serta merta, setiap saat dan yang dikecualikan	Ada Sebagian Besar	75
3	Inovasi Pengembangan Layanan Publik		
3,1	Memiliki layanan publik yang memberi hak akses publik tentang: Perencanaan Program dan Anggaran dan Realisasi Anggaran Real Time	Ada Lengkap	100
3,2	Memiliki aplikasi layanan publik berbasis mobile (android, linux, apple, dll)	Layanan Perizinan	100
		Jumlah	94,23

- Penyediaan Informasi Informasi Wajib Berkala

No.	Pernyataan	Kondisi Tahun 2022	NILAI
1	Informasi Profil Badan Publik		
1,1	Mengumumkan informasi terkait alamat lengkap Badan Publik, dengan mencakup nama jalan, nomor, kota/kab, provinsi, kode pos, no.tlp/fax dan alamat email/webmail	Ada Sebagian	100
1,2	Mengumumkan informasi visi dan misi Badan Publik	Ada Lengkap	100
1,3	Mengumumkan informasi terkait struktur organisasi Badan Publik sampai dengan tiga tingkat kebawah	Ada Lengkap	100
1,4	Mengumumkan informasi terkait tugas dan fungsi Badan Publik	Ada Lengkap	100
2	Informasi Profil Pimpinan Badan Publik		
2,1	Mengumumkan informasi terkait profil singkat pimpinan dan/atau pejabat struktural Badan Publik tiga level ke bawah yang mencakup sekurang-kurangnya nama, jabatan, pendidikan dan penghargaan yang pernah diterima	Ada Sebagian Besar	75
2,2	Mengumumkan LHKPN terakhir Pimpinan Daerah yang telah diperiksa KPK, atau telah menyerahkan LHKPN/LHKASN kepada KPK disertai tanda bukti kirim.	Ada Sebagian Besar	75
3	Informasi Kegiatan dan Kinerja Badan Publik		
3,1	Mengumumkan informasi tentang program/kegiatan yang telah dijalankan di Tahun 2021 yang memuat: Nama Program/Kegiatan, Penanggung Jawab/Pelaksana Program, Jadwal kegiatan/program, Target capaian atau penyerapan, dan Sumber dan besaran anggaran	Ada Lengkap	100
3,2	Mengumumkan kerangka acuan kerja (KAK/TOR) kegiatan sesuai dengan program/kegiatan tahun 2022	Belum Ada	0
3,3	Mengumumkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2020	Ada Lengkap	100
4	Informasi Keuangan Badan Publik		
4,1	Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Tahun 2021	Ada Lengkap	100
4,2	Neraca Tahun 2021	Ada Lengkap	100
4,3	Catatan atas laporan keuangan (CALK) Tahun 2021	Ada Lengkap	100
4,4	Daftar asset dan inventaris daerah Tahun 2021	Ada Lengkap	100
4,5	Ringkasan APBD Tahun 2022	Ada Lengkap	100
4,6	Ringkasan Perubahan APBD Tahun 2022	Ada Lengkap	100
4,7	Ringkasan APBD Tahun 2022	Ada Lengkap	100

4,8	Ringkasan Rencana Kerja Anggaran (RKA OPD) Tahun 2022	Ada Lengkap	100
4,9	Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) OPD Tahun 2022	Ada Lengkap	100
4,10	Ringkasan Rencana Kerja Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (RKA PPKD) Tahun 2021	Ada Lengkap	100
4,11	Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (DPA PPKD) Tahun 2022	Ada Lengkap	100
4,12	Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) seluruh OPD Tahun 2021	Ada Lengkap	100
4,13	Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) LRA PPKD Tahun 2021	Ada Lengkap	100
4,14	Laporan Arus Kas (LAK) Tahun 2021	Ada Lengkap	100
4,15	Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang sudah diaudit Tahun 2021	Ada Lengkap	100
4,16	Opini BPK-RI atas LKPD Tahun 2021	Ada Lengkap	100
5	Informasi Laporan Akses Informasi Badan Publik		
5,1	Jumlah permohonan informasi publik yang diterima	Ada Sebagian	50
5,2	Mengumumkan Waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap permohonan informasi publik	Ada Sebagian	50
5,3	Jumlah permohonan informasi publik yang dikabulkan sebagian atau seluruhnya	Ada Sebagian	50
5,4	Alasan penolakan permohonan informasi publik	Ada Sebagian	50
6	Informasi mengenai Hak Memperoleh Informasi di Badan Publik		
6,1	Mengumumkan Tata Cara memperoleh informasi publik	Ada Lengkap	100
6,2	Mengumumkan Tata Cara Mengajukan Keberatan atas Permohonan Informasi Publik	Ada Lengkap	100
6,3	Mengumumkan prosedur permohonan sengketa informasi	Ada Lengkap	100
6,4	Menyediakan form permohonan dan keberatan	Ada Lengkap	100
7	Informasi mengenai Pengadaan Barang dan Jasa Badan Publik		
7,1	Menyediakan dan Mengumumkan informasi tentang pengadaan barang dan jasa Tahun 2020 yang sekurang-kurangnya memuat 1) Nama lelang 2) Tanggal pembuatan 3) Lingkup Pekerjaan, 4) Tahapapan Lelang 5) Metode Pengadaan 6) Tahun anggaran, 7) Nilai Pagu Paket dan HPS 8). Lokasi Pekerjaan 9) Syarat Kualifikasi	Ada Sebagian	50

8	Informasi mengenai Regulasi Badan Publik		
8,1	Mengumumkan Daftar Rancangan Peraturan, keputusan dan/atau kebijakan yang akan dikeluarkan/ditetapkan	Ada Sebagian	50
8,2	Mengumumkan daftar peraturan, keputusan, dan/atau kebijakan yang telah ditetapkan	Ada Lengkap	100
Jumlah			87,50

- Informasi Tersedia Setiap Saat

No.	Pernyataan	Kondisi Tahun 2022	NILAI
1	Perki 1/2010 tentang SLIP menetapkan 6 (enam) jenis informasi publik berkaitan dengan Peraturan, Keputusan, dan/atau Kebijakan Badan Publik. Apakah Badan Publik Saudara memiliki, menguasai dan menyediakan seluruh/sebagian jenis-jenis informasi publik dimaksud.		
1,1	Dokumen pendukung dalam bentuk naskah akademis, kajian atau pertimbangan atas kebijakan yang telah ditetapkan Tahun Anggaran 2022	Belum Ada	0
1,2	Masukan-masukan dari berbagai pihak atas peraturan, keputusan dan kebijakan Tahun Anggaran 2021	Belum Ada	0
1,3	Rancangan peraturan, keputusan atau kebijakan Tahun Anggaran 2022	Belum Ada	0
1,4	Risalah rapat dari proses pembentukan peraturan, keputusan atau kebijakan Tahun Anggaran 2022	Belum Ada	0
1,5	Tahap perumusan peraturan, keputusan atau kebijakan yang dikeluarkan Tahun Anggaran 2022	Belum Ada	0
1,6	Peraturan, keputusan dan/atau kebijakan yang telah diterbitkan Tahun Anggaran 2022	Ada Lengkap	100
2	Badan Publik Saudara memiliki, menguasai atau menyediakan Informasi mengenai surat-surat perjanjian dengan pihak ketiga yang dilengkapi dengan dokumen pendukung.		
2,1	Dokumen tentang Memorandum of Understanding/ Lol/ Nota Kesepahaman/ Nota Kerjasama/sejenisnya berikut dokumen pendukungnya Tahun Anggaran 2022	Ada Lengkap	100
2,2	Dokumen pengadaan barang dan jasa lengkap dengan pendukungnya, termasuk kontrak/SPK Tahun Anggaran 2021 & 2022	Belum Ada	0

3	Apakah Badan Publik Saudara memiliki, menguasai dan menyediakan Informasi-informasi tentang organisasi, administrasi dan kepegawaian sebagaimana dibawah ini.		
3,1	Pedoman pengelolaan organisasi, administrasi, personil dan keuangan	Ada Sebagian Besar	75
3,2	Profil lengkap pimpinan dan pegawai yang meliputi nama, sejarah karir atau posisi, sejarah pendidikan dan penghargaan yang pernah diraih	Ada Sebagian Besar	75
3,3	Anggaran Badan Publik secara umum maupun anggaran secara khusus unit pelaksana teknis serta laporan keuangannya.	Ada Lengkap	100
3,4	Data statistik yang dibuat dan dikelola oleh Badan Publik.	Ada Sebagian Besar	100
4	Apakah Badan Publik Saudara memiliki, menguasai dan atau menyediakan dokumen-dokumen keuangan dalam rentang waktu 3 (tiga) tahun terakhir		
4,1	Laporan realisasi anggaran	Ada Lengkap	100
4,2	Neraca	Ada Lengkap	100
4,3	Catatan atas laporan keuangan (CALK)	Ada Lengkap	100
4,4	Daftar asset dan inventaris	Ada Lengkap	100
4,5	Perda APBD	Ada Lengkap	100
4,6	Perda APBD Perubahan	Ada Lengkap	100
4,7	RKA OPD	Ada Lengkap	100
4,8	DPA OPD	Ada Lengkap	100
4,9	RKA PPKD	Ada Lengkap	100
4,10	DPA PPKD	Ada Lengkap	100
4,11	Laporan Realisasi Anggaran (LRA) seluruh OPD	Ada Lengkap	100
4,12	Laporan Realisasi Anggaran (LRA) LRA PPKD	Ada Lengkap	100
4,13	LKPD (audited)	Ada Lengkap	100
4,14	Opini BPK-RI atas LKPD	Ada Lengkap	100
4,15	Laporan Arus Kas	Ada Lengkap	100
5	Badan Publik Saudara memiliki, menguasai atau menyediakan Informasi tentang hal-hal berikut ini.		
5,1	Syarat-syarat perizinan	Ada Lengkap	100
5,2	Izin yang diterbitkan dan/atau dikeluarkan	Ada Lengkap	100
5,2	Dokumen pendukung izin yang diterbitkan/ dikeluarkan	Ada Lengkap	100

6	Badan Publik Saudara memiliki, menguasai dan menyediakan Informasi mengenai laporan pelayanan informasi publik		
6,1	Dokumen kegiatan pelayanan Informasi Publik yang memuat sarana prasarana, SDM, anggaran dan penggunaan anggaran Tahun 2022	Ada Sebagian	50
7	Kegiatan Pelayanan Informasi Publik		
7,1	Sarana dan prasarana layanan informasi publik yang dimiliki beserta kondisinya	Ada Lengkap	100
7,2	Sumber daya manusia yang menangani layanan informasi publik beserta kualifikasinya	Ada Lengkap	100
7,3	Anggaran layanan informasi publik beserta laporan penggunaannya	Ada Lengkap	100
8	Informasi Lain-lain		
8,1	Memiliki dan menyediakan Informasi tentang rencana strategis dan rencana kerja	Ada Lengkap	100
8,2	Memiliki dan menyediakan data aset atau inventaris Tahun Anggaran 2020	Ada Lengkap	100
Jumlah			85,42

- *DIP dan Informasi yang dikecualikan*

No.	Pernyataan	Kondisi Tahun 2021	NILAI
1	Daftar Informasi Publik		
1,1	Menetapkan Daftar Informasi Publik (DIP) Tahun 2020	Ada Lengkap	100
1,2	Daftar Informasi Publik PPID Utama	Ada Lengkap	100
1,3	Daftar Informasi Publik PPID Pembantu	Ada Sebagian Besar	75
1,4	Menetapkan SOP Penyusunan DIP	Ada Lengkap	100
1,5	DIP disusun menguraikan ringkasan dan detail substansi setiap jenis informasi	Ada Lengkap	100
1,6	Daftar Informasi Publik ditetapkan oleh Atasan PPID disertai dengan SK Penetapan	Ada Lengkap	100
1,7	DIP dilakukan pembaharuan berkala (updating)	Ada Sebagian Besar	75
2	Informasi Dikecualikan		
2,1	Daftar Informasi Publik yang dikecualikan	Ada Lengkap	100
2,2	PPID melakukan uji konsekuensi informasi yang dikecualikan	Ada Lengkap	100
2,3	Hasil uji konsekuensi ditetapkan dalam bentuk surat keputusan yang ditanda tangani Atasan PPID	Ada Lengkap	100
2,4	Memiliki dan menyediakan naskah pertimbangan hasil uji konsekuensi	Ada Lengkap	100
Jumlah			95,45

b). Pendokumentasian

No.	Pertanyaan	Data Pendukung	NILAI
1	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi		
1,1	Apakah Badan Publik telah menunjuk PPID yang tertuang dalam Peraturan/Keputusan yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang?	Ada Lengkap	100
1,2	Apakah tugas dan fungsi PPID pada Badan Publik saudara tertuang dalam bentuk Peraturan/Keputusan?	Ada Lengkap	100
1,3	Apakah Badan Publik Saudara telah memiliki struktur/bagan PPID yang tertuang dalam Peraturan/Keputusan?	Ada Lengkap	100
2	Koordinasi PPID dengan satuan/unit kerja di Badan Publik		
2,1	Apakah ada koordinasi yang dilakukan secara rutin dan terjadwal?	Ada Lengkap	100
2,2	Apakah ada pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap orang atas informasi?	Ada Lengkap	100
3	Tata Kelola Pendokumentasian Informasi		
3,1	Apakah Badan Publik anda memiliki SOP dalam penyimpanan informasi dan dokumentasi?	Ada Lengkap	100
3,2	Apakah badan publik anda menyimpan informasi dan dokumentasi dalam bentuk manual?	Ada Lengkap	100
3,3	Apakah badan publik anda menyimpan informasi dan dokumentasi dalam bentuk digital?	Ada Lengkap	100
3,4	Apakah penyimpanan informasi dan dokumentasi memiliki Ruang Arsip tersendiri?	Ada Sebagian	50
3,5	Apakah Badan Publik anda memiliki anggaran tetap dalam penatausahaan dan penyimpanan informasi?	Ada Sebagian Besar	75
Jumlah Nilai			92,5

c). Pelayanan Informasi

No.	Pernyataan	Kondisi Tahun 2022	NILAI
1	Peraturan Pelayanan Informasi Publik		
1,1	Memiliki Peraturan Bupati/Walikota tentang Pelayanan Informasi Publik	Ada Lengkap	100
1,2	Keputusan Bupati/Walikota tentang PPID Utama dan PPID Pembantu	Ada Lengkap	100
1,3	Peraturan/Keputusan mengenai Tugas dan fungsi PPID pada Badan Publik	Ada Lengkap	100
2	Memiliki SOP tentang Tata Kelola Informasi Publik		
2,1	SOP Penyusunan Daftar Informasi Publik	Ada Lengkap	100

2,2	SOP Pelayanan Permohonan Informasi Publik	Ada Lengkap	100
2,3	SOP Uji Konsekuensi Informasi Publik	Ada Lengkap	100
2,4	SOP Penanganan Keberatan Informasi Publik	Ada Lengkap	100
2,5	SOP Fasilitasi Sengketa Informasi	Ada Lengkap	100
3	Aktivitas PPID		
3,1	Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi dari PPID Pembantu	Ada Lengkap	100
3,2	Melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan informasi dan dokumentasi yang dilakukan oleh PPID Pembantu	Ada Lengkap	100
3,3	Melaksanakan rapat koordinasi dan rapat kerja secara berkala dan/atau sesuai dengan kebutuhan	Ada Sebagian Besar	100
3,4	Memiliki agenda rutin dan terjadwal kegiatan PPID Utama dengan PPID Pembantu terkait:	Ada Sebagian Besar	75
3,5	Penyusunan dan Penetapan Daftar Informasi Publik	Ada Lengkap	100
3,6	Uji Konsekuensi	Ada Lengkap	100
3,7	Membuat laporan layanan informasi publik ke Komisi Informasi secara berkala	Ada Lengkap	100
3,8	Melakukan sinergitas PPID dengan Pimpinan daerah	Ada Lengkap	100
4	Pelayanan Informasi		
4,1	Menyediakan ruang khusus pelayanan informasi lengkap dengan meja, kursi, kursi tunggu dan sarana penerimaan serta komputer (desk information) yang mudah di akses publik	Ada Sebagian Besar	75
4,2	Ada Petugas khusus yang melayani informasi Publik	Ada Lengkap	100
4,3	Menyediakan Informasi Publik pada Papan pengumuman informasi	Ada Sebagian Besar	75
4,4	Memiliki anggaran tetap bagi tata kelola informasi publik	Ada Lengkap	100
4,5	Apakah memiliki Ruang Khusus PPID	Ada Sebagian	50
4,6	Apakah memiliki Meja layanan Informasi Publik	Ada Lengkap	100

Jumlah Nilai

94,32

REKAPITULASI

No.	Variabel Penilaian	Persentase	Nilai	Hasil
1.	Pengumuman melalui Website	25%	94,23	23,56
2.	Pelayanan Informasi	30%	89,46	26,84
	2.1 - Informasi Wajib berkala		87,50	
	2.2 - Informasi Tersedia Setiap Saat		85,42	
	2.3 - Daftar Informasi Publik dan Informasi Dikecualikan		95,45	
3.	Pendokumentasian	25%	92,5	23,125
4.	Pelayanan Informasi	20%	94,32	18,86
Total		100		92,38
PREDIKAT : MENUJU INFORMATIF				

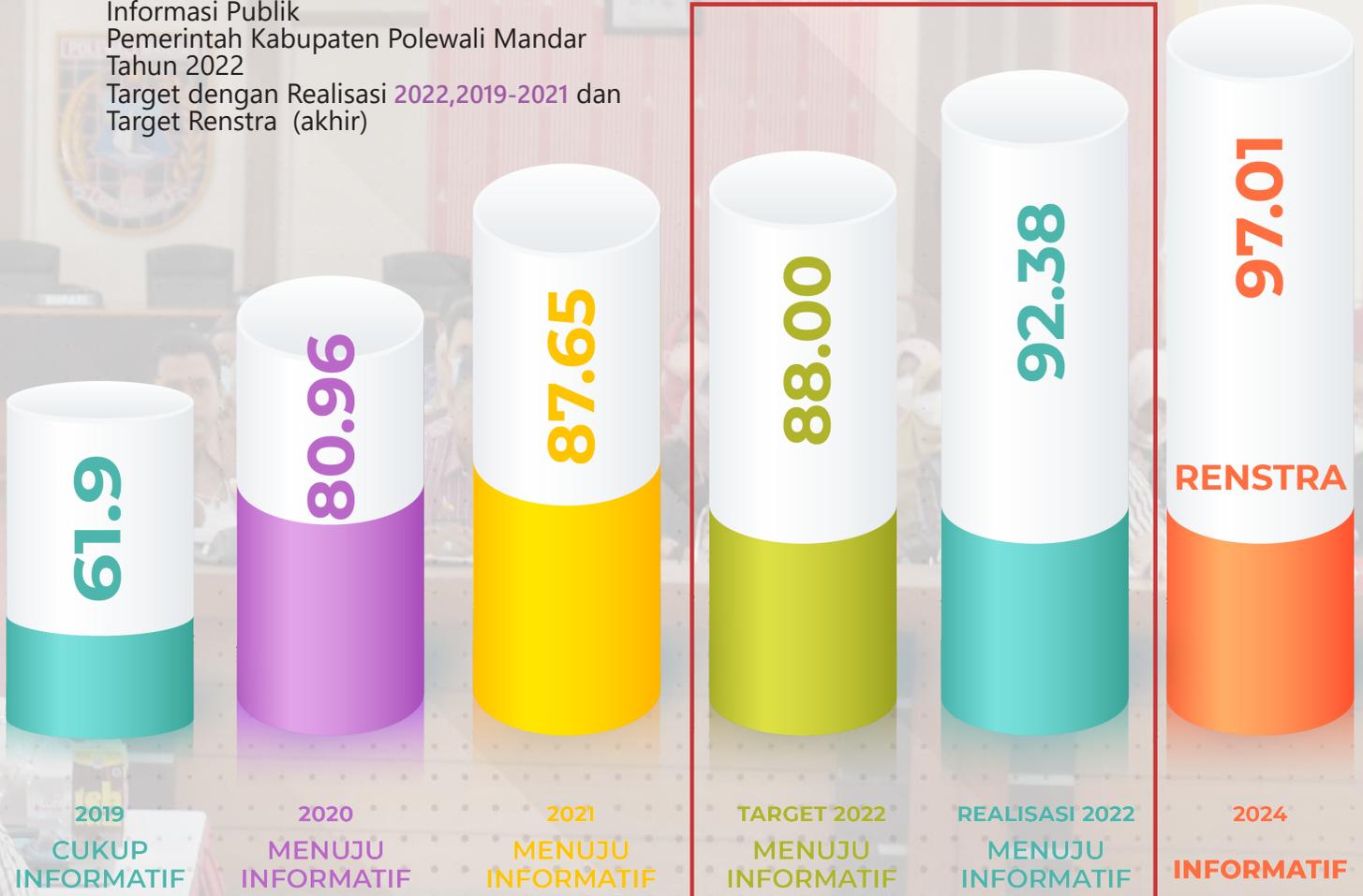
Berdasarkan hasil pengukurannya tingkat capaian kinerja Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Tahun 2022 pada sasaran strategis I digambarkan dalam tabel sebagai berikut :

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Meningkatnya Kualitas Keterbukaan Informasi Publik	Predikat Keterbukaan Informasi Publik	Menuju Informatif (88.00)	Menuju Informatif (92,38)	104,9%

Tabel 3.1
Pengukuran Kinerja
Sasaran Strategis I
Tahun 2022

Sesuai hasil pengukuran kinerja pada sasaran strategis I, predikat keterbukaan informasi publik melebihi target yang telah ditetapkan pada perjanjian kinerja 2022, yaitu dari target menuju informatif (88.00) terealisasi menuju informatif (92,38)

Chart 3.1
Perbandingan Capaian Kinerja Keterbukaan
Informasi Publik
Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar
Tahun 2022
Target dengan Realisasi 2022, 2019-2021 dan
Target Renstra (akhir)



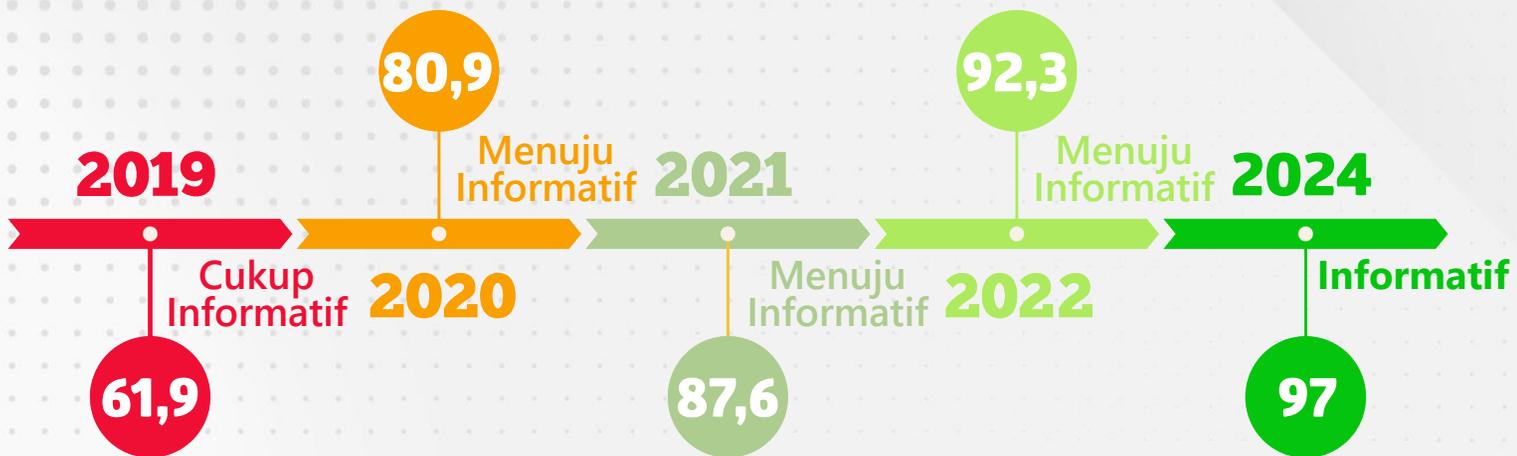
*Sumber : Bidang IKP Dinas KominfoSP, Januari 2023



Mencermati chart tersebut di atas, apabila dibandingkan dengan target, capaian kinerja tahun 2022 mencapai 104,9 %. Selanjutnya kondisi capaian 2022 ini meningkat sebesar 30,48% dari kondisi tahun 2020 yang saat itu predikat keterbukaan informasi publik cukup informatif (61,9%). Predikat keterbukaan informasi publik dari cukup informatif mengalami peningkatan signifikan pada tahun 2020 (80,96%), dengan predikat menuju informatif. Capaian ini dipengaruhi upaya Dinas KominfoSP selaku PPID utama, dalam menyediakan sarana utama penyedia layanan informasi public melalui website dan e-PPID pada setiap Perangkat Daerah selaku PPID pembantu. Sarana layanan informasi public, kemudian didukung terbentuknya admin e-PPID dan website pada Perangkat Daerah. Tahun 2021, predikat keterbukaan informasi public mengalami peningkatan dari kondisi tahun 2020, mencapai (87,55%) predikat menuju informatif. Kondisi ini dipengaruhi terlaksananya pendampingan secara kontinu oleh PPID utama kepada Perangkat Daerah selaku PPID pembantu.

Hal ini secara nyata memberi dampak bagi PPID pembantu berpartisipasi lebih aktif dalam mengupdate informasi public pada website dan e-PPID. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap daftar informasi public yang terupdate oleh PPID pembantu, turut memberikan pengaruh yang cukup signifikan. Predikat menuju informatif (92,38%) selanjutnya dapat dicapai melebihi target (88,00%) pada tahun 2022. Capaian ini didukung kinerja PPID utama dalam meningkatkan peran dan komitmen implementasi keterbukaan informasi public pada Perangkat Daerah selaku PPID Pembantu. Website sebagai sarana utama layanan informasi public, oleh PPID utama juga telah diupgrade di tahun 2022 untuk peningkatan layanan. Hal ini juga berpengaruh secara nyata terhadap pengelolaan serta pelayanan informasi yang lebih berkualitas, cepat dan mudah. Dengan kondisi ini, layanan informasi public tersaji lebih informatif untuk digunakan oleh pemohon informasi dalam mendukung keterbukaan informasi publik.

Apabila dibandingkan dengan target jangka menengah yang tertuang dalam RENSTRA 2019-2024 yaitu kondisi predikat informatif (97,01), maka kondisi saat ini sudah mencapai 92,38%. Capaian ini, dapat digambarkan dengan milestone sebagai berikut :



Analisis Keberhasilan dan Kegagalan

Faktor Penunjang :

1. Adanya regulasi terkait keterbukaan informasi publik, yang meliputi tata kelola informasi publik, daftar informasi publik dan admin e-PPID.
2. Upgrade secara berkala sarana utama layanan informasi public (Website).
3. Peningkatan peran dan komitmen PPID pembantu dalam mengupdate informasi publik.

Faktor Penghambat :

1. Kurang optimalnya sosialisasi ke masyarakat dalam memperoleh informasi dan dokumen publik sesuai standar prosedur utamanya akses secara elektronik.
2. Monitoring dan evaluasi pengelolaan IP melalui website dan e-PPID belum terlaksana secara berkala.

Alternatif Solusi yang telah diupayakan :

- Internalisasi dan pendampingan berkelanjutan PPID Pembantu dalam pengelolaan pengelolaan informasi publik termasuk pengelolaan website perangkat daerah yang terintegrasi dengan www.polmankab.go.id.
- Penguatan koordinasi PPID utama dengan PPID pembantu.
- Peningkatkan kualitas pengelolaan Aplikasi LAPOR melalui internalisasi dan pendampingan Admin Pengelola LAPOR di setiap Perangkat Daerah.

Adapun sejumlah Program dan Kegiatan yang diselenggarakan untuk memastikan tercapainya target indikator sasaran peningkatan kualitas keterbukaan informasi publik, sebagai berikut :

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Alokasi Anggaran	Realisasi	%
Program Informasi dan Komunikasi Publik	Rp. 391.286.100,-	391.149.998,-	99.97
Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 391.286.100,-	391.149.998,-	99.97
a. Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Rp. 303.125.300,-	Rp. 302.990.198,-	99.96
b. Pelayanan Informasi Publik	Rp. 66.950.100,-	Rp. 66.950.100,-	100
c. Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Rp. 21.209.700,-	Rp. 21.209.700,-	100



Gambar 3.1. Rapat koordinasi implementasi standar layanan informasi publik pada Organisasi Perangkat Daerah



SASARAN STRATEGIS 2 :

Meningkatnya Kapabilitas Proses dan Fungsi Teknis Berbasis Elektronik

Indikator : Tingkat Kematangan Kapabilitas Proses dan Fungsi Teknis SPBE

Target : Terstandarisasi-Transaksi

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Meningkatnya Kapabilitas Proses dan Fungsi Teknis Berbasis Elektronik	Tingkat Kematangan Kapabilitas Proses dan Fungsi Teknis SPBE	Terstandarisasi Transaksi	Terstandarisasi Kolaborasi	123,6%

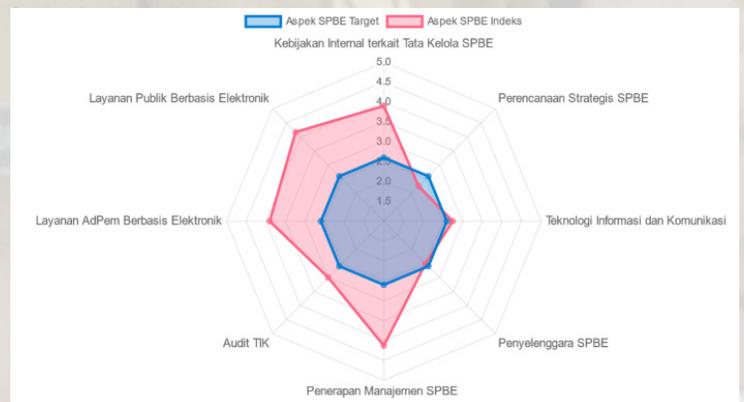
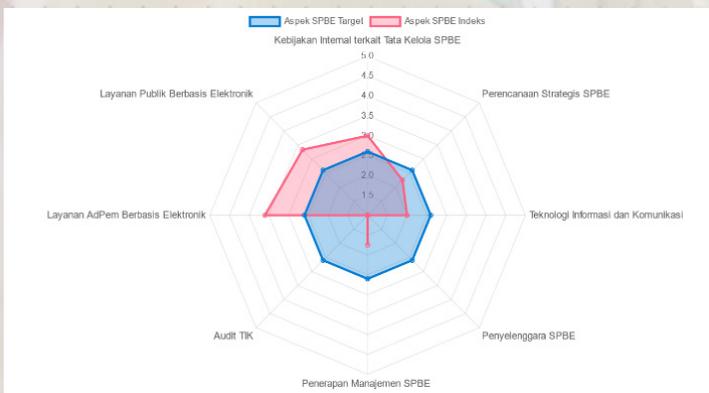
Tabel 3.2
Pengukuran Kinerja
Sasaran Strategis II
Tahun 2022

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) merupakan penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE. Untuk memastikan pelaksanaan SPBE di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah selaras dengan prinsip terintegrasi dan terpadu, maka Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah diharapkan menerapkan unsur-unsur SPBE sesuai dengan kerangka kerja Tata Kelola SPBE dan Manajemen SPBE agar penerapan SPBE dapat berjalan efektif, efisien, dan berkesinambungan, serta dapat menghasilkan layanan SPBE yang berkualitas dan optimal.

Untuk mengukur perkembangan penerapan SPBE di Indonesia, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi bersama Tim Koordinasi SPBE Nasional melaksanakan Pemantauan dan Evaluasi SPBE. Pelaksanaan Evaluasi SPBE dilakukan setiap 2 (dua) tahun sekali untuk dapat memastikan pertumbuhan penerapan SPBE pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah dapat dilaksanakan secara berkelanjutan. Evaluasi SPBE menghasilkan indeks yang diperoleh secara inkremental, yakni akan terus dilakukan pemutakhiran dari proses peningkatan hasil penilaian dan populasi dalam pelaksanaannya, sehingga memastikan progres kemajuan penerapan SPBE. Evaluasi SPBE telah dilaksanakan dengan menggunakan instrumen yang telah disesuaikan, dari yang sebelumnya 37 indikator menjadi 47 indikator, dengan berdasarkan pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi SPBE.

Berdasarkan Keputusan Menteri PAN Dan RB Nomor 108 Tahun 2023 tentang Hasil Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah, maka Indeks SPBE Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2022 yaitu 3,58 dengan predikat sangat baik. Capaian indeks SPBE tahun 2022 ini mengalami peningkatan yang signifikan dari kondisi sebelumnya, Indeks SPBE Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2021 sebesar 2,71 dengan predikat Baik.

Chart. 3.2
Perbandingan Indeks SPBE Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2021-2022



Nama Instansi	
Pemerintah Kab. Polewali Mandar	

K/L/D	: Pemerintah Kabupaten
Indeks SPBE	: 2.71
Predikat SPBE	: Baik

Domain Kebijakan SPBE	: 3.00
Kebijakan Internal terkait Tata Kelola SPBE	: 3.00
Domain Tata Kelola SPBE	: 1.90
Perencanaan Strategis SPBE	: 2.25
Teknologi Informasi dan Komunikasi	: 2.00
Penyelenggara SPBE	: 1.00
Domain Manajemen SPBE	: 1.55
Penerapan Manajemen SPBE	: 1.75
Audit TIK	: 1.00
Domain Layanan SPBE	: 3.49
Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik	: 3.60
Layanan Publik Berbasis Elektronik	: 3.33

Nama Instansi	
Pemerintah Kab. Polewali Mandar	

K/L/D	: Pemerintah Kabupaten
Indeks SPBE	: 3.58
Predikat SPBE	: Sangat Baik

Domain Kebijakan SPBE	: 3.90
Kebijakan Internal terkait Tata Kelola SPBE	: 3.90
Domain Tata Kelola SPBE	: 2.50
Perencanaan Strategis SPBE	: 2.25
Teknologi Informasi dan Komunikasi	: 2.75
Penyelenggara SPBE	: 2.50
Domain Manajemen SPBE	: 3.82
Penerapan Manajemen SPBE	: 4.13
Audit TIK	: 3.00
Domain Layanan SPBE	: 4.01
Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik	: 3.90
Layanan Publik Berbasis Elektronik	: 4.17

Penerapan SPBE dinilai dengan metode tingkat kematangan SPBE yang merupakan kerangka kerja untuk mengukur derajat kematangan penerapan SPBE yang ditinjau dari kapabilitas proses dan kapabilitas fungsi teknis SPBE. Tingkat kematangan SPBE terdiri atas 5 (lima) level, dimana masing-masing level menunjukkan karakteristik kematangan tertentu pada kapabilitas proses dan kapabilitas fungsi teknis SPBE.

Tingkat Kematangan Penerapan SPBE

Tingkat Kematangan Pada Kapabilitas Proses

1. Rintisan	• Pengaturan dalam bentuk konsep yang belum ditetapkan dan Proses tata kelola dilaksanakan secara <i>ad-hoc</i> .
2. Terkelola	• Pengaturan telah ditetapkan dengan memenuhi sebagian kebutuhan di Instansi Pemerintah serta proses tata kelola dilaksanakan dengan dasar-dasar manajemen terdokumentasi.
3. Terstandarisasi	• Pengaturan telah ditetapkan dengan memenuhi semua kebutuhan di Instansi Pemerintah serta proses tata kelola dilaksanakan sepenuhnya dengan standarisasi.
4. Terintegrasi dan Terukur	• Pengaturan telah ditetapkan dengan memenuhi kebutuhan hubungan antar Instansi Pemerintah serta proses tata kelola dilaksanakan dengan pengukuran kinerja secara kuantitatif.
5. Optimum	• Pengaturan telah ditetapkan dan dievaluasi terhadap perubahan kebutuhan di lingkungan internal dan eksternal serta proses tata kelola dilaksanakan dengan peningkatan kualitas.

Tingkat Kematangan Pada Kapabilitas Fungsi Teknis

1. Informasi	• Layanan SPBE dalam bentuk informasi satu arah.
2. Interaksi	• Layanan SPBE dalam bentuk informasi dua arah.
3. Transaksi	• Layanan SPBE dalam bentuk pertukaran informasi dan layanan.
4. Kolaborasi	• Layanan SPBE terintegrasi dengan layanan SPBE lain.
5. Optimalisasi	• Layanan SPBE dapat beradaptasi terhadap perubahan lingkungan internal dan eksternal.

Adapun capaian tingkat kematangan pada kapabilitas proses dan tingkat kematangan pada kapabilitas fungsi teknis Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar, dapat dilihat pada tabel 3.3 berikut:

Tabel 3.3

Tingkat Kematangan Kapabilitas Proses dan Tingkat Kematangan pada Kapabilitas Fungsi Teknis Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2022

No.	Indikator	Level
A. Tingkat Kematangan pada Kapabilitas Proses		3,42
1	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	5
2	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	4
3	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Manajemen Data	3
4	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Pembangunan Aplikasi SPBE	4
5	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Layanan Pusat Data	4
6	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Layanan Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	4
7	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	4
8	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Manajemen Keamanan Informasi	3
9	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Audit TIK	5
10	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	3
11	Tingkat Kematangan Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	3
12	Tingkat Kematangan Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	3
13	Tingkat Kematangan Rencana dan Anggaran SPBE	1
14	Tingkat Kematangan Inovasi Proses Bisnis SPBE	2
15	Tingkat Kematangan Pembangunan Aplikasi SPBE	4
16	Tingkat Kematangan Layanan Pusat Data	2
17	Tingkat Kematangan Layanan Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	2
18	Tingkat Kematangan Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	3
19	Tingkat Kematangan Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	2
20	Tingkat Kematangan Kolaborasi Penerapan SPBE	3
21	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Risiko SPBE	3
22	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Keamanan Informasi	5

23	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Data	4
24	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Aset TIK	5
25	Tingkat Kematangan Penerapan Kompetensi Sumber Daya Manusia	1
26	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Pengetahuan	5
27	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Perubahan	5
28	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Layanan SPBE	5
29	Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Infrastruktur SPBE	3
30	Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Aplikasi SPBE	3
31	Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Keamanan SPBE	3

B. Tingkat Kematangan pada Kapabilitas Fungsi Teknis		4
32	Tingkat Kematangan Layanan Perencanaan	4
33	Tingkat Kematangan Layanan Penganggaran	4
34	Tingkat Kematangan Layanan Keuangan	4
35	Tingkat Kematangan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa	4
36	Tingkat Kematangan Layanan Kepegawaian	4
37	Tingkat Kematangan Layanan Kearsipan Dinamis	4
38	Tingkat Kematangan Layanan Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah	3
39	Tingkat Kematangan Layanan Pengawasan Internal Pemerintah	4
40	Tingkat Kematangan Layanan Akuntabilitas Kinerja Organisasi	4
41	Tingkat Kematangan Layanan Kinerja Pegawai	4
42	Tingkat Kematangan Layanan Pengaduan Pelayanan Publik	4
43	Tingkat Kematangan Layanan Data Terbuka	4
44	Tingkat Kematangan Layanan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH)	4
45	Tingkat Kematangan Layanan Publik Sektor 1	4
46	Tingkat Kematangan Layanan Publik Sektor 2	4
47	Tingkat Kematangan Layanan Publik Sektor 3	5

Sumber: <https://monev.spbe.go.id>

Memperhatikan hasil perhitungan pada Tingkat Kematangan Kapabilitas Proses dan Tingkat Kematangan pada Kapabilitas Fungsi Teknis Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2022, maka dapat disimpulkan bahwa Tingkat Kematangan SPBE pada kapabilitas proses nilai 3,42 atau dengan tingkat kematangan Terstandarisasi, sedangkan untuk Tingkat Kematangan SPBE pada kapabilitas fungsi teknis nilai 4,0 dengan predikat tingkat kematangan kolaborasi. Dengan demikian realisasi kinerja melampaui target kinerja yang direncanakan yaitu Terstandarisasi (nilai 3) -Transaksi (nilai 3). Adapun capaian kinerja dimaksud dapat digambarkan melalui chat berikut:

Chart. 3.3

Target dan Realisasi Kinerja Tingkat Kematangan Kapabilitas Proses dan Tingkat Kematangan pada Kapabilitas Fungsi Teknis Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2022



Sumber : Data Olah,
<https://monev.spbe.go.id>

1

Capaian Kinerja Dasar Target 2022

= $\frac{3,71}{3}$ **123,6%**

2

Capaian Kinerja Dasar 2021-2022, Meningkatkan

32,10%

3

Capaian Kinerja target Akhir Renstra

= $\frac{3,71}{3,5}$ **106%**

Sebagaimana tertuang dalam Kebijakan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Electronic (SPBE) bahwa sangat penting dalam penyelenggaraan pemerintahan memanfaatkan teknologi informasi komunikasi baik dalam aspek kebijakan, tata kelola maupun dalam aspek layanan pemerintahan. Pada aspek layanan sebagai implementasi dari kebijakan (komitmen) dan tata kelola, maka Pemerintah Daerah dapat mengembangkan aplikasi sebagai tools untuk mewujudkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan termasuk dalam hal pelayanan publik. Pengembangan dimaksud baik berupa aplikasi yang bersifat umum berbagi pakai maupun bersifat khusus sesuai kekhususan dari penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Namun dalam pengembangan dan pemanfaatan aplikasi dimaksud perlu memperhatikan aspek integrasi dan interoperabilitas sistem informasi untuk mencegah adanya pemborosan pengelolaan sistem informasi.

Berdasarkan hasil pemetaan tahun 2022, maka diketahui kondisi fungsi-fungsi utama Pemerintahan Daerah yang didukung oleh teknologi informasi dan komunikasi, sebagai berikut :

Tabel 3.4

Pemetaan Fungsi-fungsi Utama Pemerintahan Yang telah didukung Teknologi Sistem Informasi Tahun 2022

No	Fungsi-fungsi Utama Perangkat Daerah	Aplikasi Yang Digunakan
1	SEKRETARIAT DAERAH	
1	fungsi Tata Pemerintahan	Elektronik-LPPD, Elektronik-SPM
2	fungsi Kesejahteraan Rakyat	-
3	fungsi Hukum	JDIH
4	fungsi Administrasi Pembangunan	-
5	fungsi Pengadaan Barang Dan Jasa	SiRUP, LPSE
6	fungsi Perekonomian Dan SDA	-
8	fungsi Organisasi	-
	- fungsi kelembagaan	e-sakip,
	- fungsi ketatalaksanaan dan pelayanan publik	Sistem Informasi Pelayanan Publik
	- fungsi reformasi birokrasi	e-PMPRB, SKP Online
9	fungsi Protokol dan Komunikasi Pimpinan	-
2	SEKRETARIAT DPRD	
1	fungsi Risalah dan Persidangan	-
2	fungsi Hubungan Masyarakat	-
3	INSPEKTORAT	
1	Fungsi Pengawasan	Whistle Blowing System
2	Fungsi Audit	e-Auditee
3	Fungsi Review	e-review SAKIP OPD
4	Fungsi Pemantauan Tindak Lanjut	SimHPPemda
4	BALITBANGREN	
1	fungsi penelitian dan pengembangan	Sistem Inovasi Daerah
2	fungsi Perencanaan Dan Pengendalian Program	Sistem Informasi Pembangunan Daerah
5	BADAN KEUANGAN	
1	fungsi Anggaran	Sistem Informasi Pembangunan Daerah
2	fungsi Verifikasi Dan Perbendaharaan	SIMDA Keuangan
3	fungsi Akuntansi	SIMDA Keuangan
4	fungsi Aset	SIMDA BMD
6	BKPP	
1	fungsi Pengadaan, Informasi Kinerja Pegawai	SIMPEG, e-LAPKIN
2	fungsi Administrasi Kepegawaian	SAPK
3	fungsi Pendidikan Dan Pelatihan	-
7	BADAN KESBANG POL	
1	fungsi Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan, Karakter Bangsa Serta Ketahanan Ekonomi Sosial & Budaya	Sistem Informasi Ketahanan Ekonomi Sosial Budaya
2	fungsi Politik Dalam Negeri	Sistem Informasi Politik Dalam Negeri
3	fungsi Organisasi Kemasyarakatan, Penanganan Konflik Dan Kewaspadaan Nasional	Sistem Informasi Organisasi Kemasyarakatan
8	BPBD	
1	fungsi Pencegahan Dan Kesiapsiagaan	InaRISK Personal
		Sistem Penerima Peringatan Informasi Gempa Bumi
		Sistem Informasi Prakiraan Cuaca, Iklim, Udara dan Gempa Bumi
		Data Informasi Bencana Indonesia
2	fungsi Kedaruratan Dan Logistik	InaRISK Personal
3	fungsi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi	Aplikasi e-Proposal Rehabilitasi dan Rekonstruksi
9	BADAN PENDAPATAN	
1	fungsi Perencanaan, Perhitungan dan Penetapan Pendapatan	SIMPADU
2	fungsi Penagihan	SIMPADU
3	fungsi Pembinaan, Pengawasan, Pembukuan dan Pelaporan	SIMPADU

10	DINAS KESEHATAN	
	1	fungsi Kesehatan Masyarakat
	2	fungsi Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit
	3	fungsi Pelayanan Kesehatan
		Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit
	4	fungsi Sumber Daya Kesehatan
		Sistem Informasi Kesehatan Daerah
		Sistem Sumber Daya Manusia Kesehatan
11	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
	1	fungsi Penegakan Peraturan Perundang-Undangan
	2	fungsi Ketertiban Umum Dan Ketentraman
	3	fungsi Sumber Daya Aparatur
	4	fungsi Perlindungan Masyarakat
12	DIKNASBUD	
	1	fungsi Pendidikan Dan Pengajaran
	2	fungsi Sarana Dan Prasarana
	3	fungsi Pengembangan Mutu Pendidikan
	4	fungsi PAUD dan Pendidikan Masyarakat
	5	Kepala fungsi Kebudayaan
		DAPODIKAS
		DAPODIKAS
		DAPODIKAS
		DAPODIK PAUD & DIKMAS
		DAPOBUD
13	DINAS KOMINFO, STATISTIK & PERSANDIAN	
	1	fungsi Teknologi Informasi
	2	fungsi Statistik
	3	fungsi Informasi & Komunikasi publik
		Halo Yantik
		Polman Satu Data
		e-PPID
		LAPOR!
	4	fungsi Persandian
		Sertifikat Elektronik
		QR Code Polewali Mandar
14	DINAS SOSIAL	
	1	fungsi Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin
	2	fungsi Perlindungan Dan Jaminan Sosial
		e-SDM PKH
		SIKS-NG
		e-PKH
	3	fungsi Rehabilitasi Sosial
		-
15	DINAS TRANSMIGRASI TENAGA KERJA & ESDM	
	1	fungsi Perencanaan, Fasilitasi Pertanahan, Transmigrasi dan ESDM
	2	fungsi Pembangunan, Penempatan dan Pengembangan Transmigrasi
		Sistem Informasi Peta Terpadu Kawasan Transmigrasi
		Sistem Informasi Penyebaran Penduduk Transmigrasi
		Sistem Web GIS Tata Kelola Aset Transmigrasi
	3	fungsi Tenaga Kerja
		Jaringan dan Informasi Penempatan dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia
		Sistem Komputerisasi Tenaga Kerja LN
		Sistem Informasi Ketenagakerjaan
16	PENANAMAN MODAL & PTSP	
	1	fungsi Penanaman Modal
	2	fungsi Pelayanan Pendaftaran Perizinan dan Non Perizinan
	3	fungsi Peninjauan dan Penetapan
		-
		OSS, SiCantik
		-
17	DP2KBP2A	
	1	fungsi Pengendalian Penduduk, Penyuluhan Dan Penggerakan
		Sistem Informasi Kampung KB
	2	fungsi Keluarga Berencana, Ketahanan Dan Kesejahteraan Keluarga
		Sistem Informasi Keluarga
	3	fungsi Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
		Sistem Informasi Kabupaten Layak Anak
		Sistem Informasi Online Perlindungan

18	DINAS LINGKUNGAN HIDUP & KEHUTANAN		
	1	fungsi Penataan Dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup	Sistem Inventarisasi Gas Rumah Kaca Nasional
	2	fungsi Pengelolaan Limbah dan Pengendalian Pencemaran	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
	3	fungsi Kebersihan dan Pertamanan	Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional
			Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah
19	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT & DESA		
	1	fungsi Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Pembangunan Desa	Sistem Informasi Indeks Desa Membangun
	2	fungsi Pemerintahan Desa	Sistem Informasi Desa
	3	fungsi Usaha Ekonomi Desa Dan Pendayagunaan SDA Dan Teknologi Tepat Guna	-
20	DINAS PERHUBUNGAN		
	1	fungsi Pengembangan Perhubungan	-
	2	fungsi Lalu Lintas	-
	3	fungsi Angkutan	Uji KIR Kendaraan Bermotor
21	DINAS PERTANIAN & PANGAN		
	1	fungsi Tanaman Pangan Dan Hortikultura	Pusat Komando Strategis Tanaman Pangan Early Warning System Tanaman Hortikultura
	2	fungsi Peternakan	Sistem Informasi Pasar Online Nasional Ternak
			Sistem Informasi Kesehatan Hewan Nasional Yang Terintegrasi Indonesia
	3	fungsi Perkebunan	Sistem Informasi Perkebunan
	4	fungsi Pengembangan Sdm	Sistem Informasi Manajemen Penyuluhan Pertanian
	5	fungsi Prasarana Dan Sarana Pertanian	Sistem Bantuan Alsintan Online
	6	fungsi Ketahanan Pangan	-
22	DINAS PEMUDA & OLAHRAGA		
	1	fungsi Pemuda	-
	2	fungsi Olah Raga	-
	3	fungsi Usaha Pariwisata	-
	4	fungsi Promosi Wisata	-
23	DINAS PERINDAGKOP & UKM		
	1	fungsi Perindustrian	Klinik Desain Merk dan Kemasan
	2	fungsi Perdagangan	Sistem Informasi Pasar Rakyat
	3	fungsi Standarisasi Perlindungan Konsumen	-
	4	fungsi Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah	Sistem Pendataan Usaha Kecil dan Menengah Online Data System (ODS-UKM)
24	DINAS PERUMAHAN, PEMUKIMAN, PERTANAHAN		
	1	fungsi Permukiman	Sistem Informasi Pengembangan Kawasan Permukiman
	2	fungsi Pertanahan	Sistem Informasi Pertanahan
	3	fungsi Perumahan	Sistem Informasi Profil Perumahan
			Sistem Informasi Bantuan Perumahan
25	DINAS PU & PENATAAN RUANG		
	1	fungsi Sumber Daya Air	-
	2	fungsi Bina Marga	Sistem Pengelolaan Database Jalan Daerah
	3	fungsi Cipta Karya	Sistem Informasi Perencanaan dan Penganggaran Bidang Cipta karya
			Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung
	4	fungsi Bina Konstruksi	Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi
	5	fungsi Penataan Ruang	Sistem Informasi Penataan Ruang

26	DISDUK CAPIL	
1	fungsi Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Sistem Informasi Administrasi Kependudukan
2	fungsi Pelayanan Pencatatan Sipil	
3	fungsi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	
4	fungsi Pemanfaatan Data Dan Inovasi Pelayanan	
27	DINAS PERIKANAN & KELAUTAN	
1	fungsi Perikanan Budidaya	Aplikasi Kartu Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan (KUSUKA)
2	fungsi Perikanan Tangkap Dan Pesisir	-
3	fungsi Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	-
4	fungsi Kelembagaan Dan Penyuluhan	-
28	DINAS PERPUSTAKAAN & KEARSIPAN	
1	fungsi Pengembangan Perpustakaan Dan Pembudayaan Kegemaran Membaca	Manajemen Internet Perpustakaan
2	fungsi Pengolahan, Pelestarian Dan Pelayanan Perpustakaan	-
3	fungsi Kearsipan	Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI)
29	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	
1	fungsi Pelayanan Medis Dan Keperawatan	SIMRS
30	KESEKRETARIATAN PERANGKAT DAERAH	
1	Fungsi Perencanaan	Sistem Informasi Pembangunan Daerah
2	Fungsi Keuangan	Sistem Informasi Pembangunan Daerah
3	Fungsi Perbendaharaan	SIMDA Keuangan
4	fungsi Akuntansi	SIMDA Keuangan
5	fungsi Aset	SIMDA BMD
6	Fungsi Monitoring dan Pelaporan	Sistem Informasi Pembangunan Daerah
7	Fungsi Akuntabilitas Kinerja Organisasi	e-SAKIP
8	Fungsi Pelayanan Publik Perangkat Daerah	Sistem Informasi Pelayanan Publik
9	Fungsi Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Penilaian Mandiri RB
10	Fungsi Pengukuran Kinerja Individu	SKP Online
11	Fungsi Disiplin Pegawai	e-Absensi
12	Fungsi Kepegawaian	SIMPEG
13	Fungsi Informasi Publik	e-PPID Pembantu
Jumlah	120	97
Persentase Fungsi Utama Yang Telah Didukung Sistem Informasi Aplikasi		80,83%

Sumber : Bidang TIP Dinas KominfoSP, Januari 2023

Optimalnya pencapaian kinerja kualitas teknologi informasi ini juga didukung oleh semakin membaiknya kualitas bandwidth tahun 2022, sebagaimana terlihat pada chart berikut :

Tabel 3.4
Penataan Bandwitch Pemerintah Daerah Tahun 2020-2022

NO	OPD	BANDWITCH 2020	BANDWITCH 2021	BANDWITCH 2022
1	Ruang Kerja Bupati	Upto 20 Mbps, FO	Upto 20 Mbps, FO	Upto 20 Mbps, FO
2	Ruang Kerja Wabup	Upto 20 Mbps, FO	Upto 20 Mbps, FO	Upto 20 Mbps, FO
3	Ruang Kerja Sekda	Upto 20 Mbps, FO	Upto 20 Mbps, FO	Upto 20 Mbps, FO
4	Ass 1	Upto 20 Mbps	Upto 20 Mbps, FO Upto 20 Mbps, FO Upto 20 Mbps, FO	Upto 20 Mbps, FO
5	Ass 2			Upto 20 Mbps, FO
6	Ass 3			Upto 20 Mbps, FO

7	Bagian Pemerintahan	Upto 20 Mbps, FO	Upto 20 Mbps, FO	Upto 20 Mbps, FO
8	Bagian Kesra	Upto 20 Mbps, FO	Upto 20 Mbps, FO	Upto 30 Mbps, FO
9	Bagian Humas Dan Protokol	Upto 20 Mbps, FO	Upto 20 Mbps, FO	Upto 20 Mbps, FO
10	Bagian Ekonomi	Upto 20 Mbps, FO	Upto 20 Mbps, FO	Upto 20 Mbps, FO
11	Bagian Pembangunan	Upto 20 Mbps, FO	Upto 20 Mbps, FO	Upto 20 Mbps, FO
12	Bagian Pengadaan Barang Jasa	5 Mbps+ Upto 50 Mbps, FO	5 Mbps+ Upto 50 Mbps, FO	Upto 60 Mbps, FO
13	Bagian Ortala	Upto 20 Mbps, FO	Upto 20 Mbps, FO	Upto 30 Mbps, FO
14	Bagian Hukum	Upto 20 Mbps, FO	Upto 20 Mbps, FO	Upto 20 Mbps, FO
15	Bagian Umum Dan Perlengkapan	Upto 20 Mbps, FO	Upto 70 Mbps, FO	Upto 70 Mbps, FO
16	Staf Ahli	Upto 20 Mbps, FO	Upto 20 Mbps, FO	Upto 20 Mbps, FO
17	Ruang Pola	Upto 20 Mbps, FO	Upto 20 Mbps, FO	Upto 20 Mbps, FO
18	Rujab Bupati	Upto 20 Mbps, FO	Upto 80 Mbps, FO	Upto 100 Mbps, FO
19	Rujab Wakil	Upto 20 Mbps, FO	Upto 20 Mbps, FO	Upto 130 Mbps, FO
20	Rujab Sekda	Upto 20 Mbps, FO	Upto 20 Mbps, FO	Upto 20 Mbps, FO
21	Rumah Posko	Upto 20 Mbps, FO	Upto 20 Mbps, FO	-
22	Sekretariat Dprd	Upto 50 Mbps	Upto 60 Mbps FO	Upto 120 Mbps FO
23	Inspektorat	Upto 20 Mbps, FO	Upto 40 Mbps, FO	Upto 60 Mbps, FO
24	Bappeda Litbang	Upto 100 Mbps, FO	Upto 130 Mbps, FO	Upto 130 Mbps, FO
25	Badan Keuangan	3 Mbps+ Upto 50 Mbps, FO	3 Mbps+ Upto 70 Mbps, FO	3 Mbps+ Upto 120 Mbps, FO
26	Badan Pendapatan	3 Mbps+ Upto 50 Mbps, FO	3 Mbps+ Upto 60 Mbps, FO	6 Mbps+ Upto 40 Mbps, FO
27	Bkpp	3 Mbps+ Upto 50 Mbps, FO	3 Mbps+ Upto 50 Mbps, FO	Upto 70 Mbps, FO
28	Badan Kesbangpol	Upto 50 Mbps, FO	Upto 40 Mbps, FO	Upto 30 Mbps, FO
29	Bpbd	Upto 20 Mbps, FO	Upto 40 Mbps, FO	Upto 30 Mbps, FO
30	Disdikbud	Upto 20 Mbps, FO	Upto 60 Mbps, FO	Upto 80 Mbps, FO
31	Dinkes	Upto 50 Mbps, FO	Upto 70 Mbps, FO	Upto 70 Mbps, FO
32	Dinas Sosial	Upto 50 Mbps, FO	Upto 50 Mbps, FO	Upto 50 Mbps, FO
33	Dinas Pupr	Upto 50 Mbps, FO	Upto 40 Mbps, FO	Upto 60 Mbps, FO
34	Dinas Rumkimtan	Upto 20 Mbps, FO	Upto 40 Mbps, FO	Upto 50 Mbps, FO
35	Disdukcapil	Upto 50 Mbps, FO	Upto 40 Mbps, FO	Upto 50 Mbps, FO
36	Dinas Pertanian Pangan	Upto 50 Mbps, FO	Upto 50 Mbps, FO	Upto 70 Mbps, FO
37	Dinas Kelautan Perikanan	Upto 20 Mbps, FO	Upto 40 Mbps, FO	Upto 60 Mbps, FO
38	Dlhk	Upto 20 Mbps, FO	Upto 60 Mbps, FO	Upto 50 Mbps, FO
39	Dinas Transmigrasi Tenaga Kerja	Upto 50 Mbps	Upto 40 Mbps	Upto 60 Mbps, FO
40	Disperindagkop	Upto 50 Mbps, FO	Upto 50 Mbps, FO	Upto 80 Mbps, FO
41	Dispop	Upto 50 Mbps, FO	Upto 40 Mbps, FO	Upto 80 Mbps, FO
42	Dpmptsp	Upto 50 Mbps, FO	Upto 50 Mbps, FO	Upto 50 Mbps, FO

43	Dpmd	Upto 40 Mbps, FO	Upto 40 Mbps, FO	Upto 50 Mbps, FO
44	Dp2kbp3a	Upto 40 Mbps, FO	Upto 40 Mbps, FO	Upto 60 Mbps, FO
45	Dinas Satpol Pp	Upto 40 Mbps, FO	Upto 40 Mbps, FO	Upto 30 Mbps, FO
46	Dinas Kominfo Sp	3 Mbps + Upto 60 Mbps,FO	3 Mbps + Upto 60 Mbps,FO	Upto 120 Mbps, FO
47	Dinas Perhubungan	Upto 40 Mbps, FO	Upto 40 Mbps, FO	Upto 60 Mbps, FO
48	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	Upto 40 Mbps, FO	Upto 40 Mbps, FO	Upto 60 Mbps, FO
49	Kec. Binuang	Upto 10 Mbps, FO	Upto 20 Mbps, FO	Upto 10 Mbps, FO
50	Kec.Polewali	Upto 20 Mbps, FO	Upto 20 Mbps, FO	Upto 10 Mbps, FO
51	Kec. Matakali	Upto 10 Mbps, FO	Upto 20 Mbps, FO	Upto 20 Mbps, FO
52	Kec. Wonomulyo	Upto 20 Mbps, FO	Upto 20 Mbps, FO	Upto 10 Mbps, FO
53	Kec. Mapilli	Upto 20 Mbps, FO	Upto 20 Mbps, FO	Upto 20 Mbps, FO
54	Kec. Balanipa	-	Upto 20 Mbps, FO	Upto 20 Mbps, FO
55	Kec. Tinambung	Upto 20 Mbps, FO	Upto 20 Mbps, FO	Upto 20 Mbps, FO
56	Kec. Anreapi	Upto 20 Mbps, FO	Upto 20 Mbps, FO	Upto 20 Mbps, FO
57	Kec. Tutar	-	-	-
58	Kec. Bulu	-	-	-
59	Kec. Matangnga	-	-	-
60	Kec. Campalagian	Upto 20 Mbps, FO	Upto 20 Mbps, FO	Upto 20 Mbps, FO
61	Kec. Luyo	-	-	
62	Kec. Limboro	Upto 10 Mbps, FO	Upto 20 Mbps, FO	Upto 10 Mbps, FO
63	Kec. Tapango	Upto 20 Mbps, FO	Upto 20 Mbps, FO	Upto 20 Mbps, FO
64	Kec. Alu	-	-	
65	UPTD Meteorologi			Upto 20 Mbps, FO
66	UPTD Perhubungan			Upto 20 Mbps, FO
67	Mesjid Syuhada			Upto 20 Mbps, FO
68	Gedung Gadis			Upto 40 Mbps, FO
69	Rumah Kemasan			Upto 20 Mbps, FO
70	LTSA			Upto 20 Mbps, FO
Besaran Bandwitch		2080 Mbps	2150 Mbps	2849 Mbps



Kapasitas Bandwitch meningkat pada tahun 2022 dari kapasitas 2150 Mbps Menjadi 2849 Mbps dengan kualitas fiber optic.

Alokasi Anggaran : Rp. 1.222.281.900

Dari aspek eksternal, Dinas KominfoSP mengupayakan pengurangan daerah blankspot agar masyarakat lebih mudah mengakses informasi dan komunikasi sehingga berbagai sistem informasi yang dikembangkan Pemerintah Daerah dapat diakses oleh masyarakat utamanya yang terkait dengan pelayanan publik dan perkembangan layanan pemerintahan dan pembangunan. Upaya ini difasilitasi melalui peningkatan kualitas layanan penerbitan rekomendasi pendirian Menara Telekomunikasi yang telah memenuhi syarat perizinan yang lengkap dan benar sesuai persyaratan perijinan dan sistem prosedur yang berlaku serta melakukan pengawasan menara utamanya terkait dengan pemenuhan kewajiban retribusi menara telekomunikasi.

Adapun kondisi blankspot dan pertumbuhan menara telekomunikasi, dapat dilihat pada chart berikut ini :



Chart 3.5
Peningkatan Kapasitas Bandwitch Tahun 2021-2022

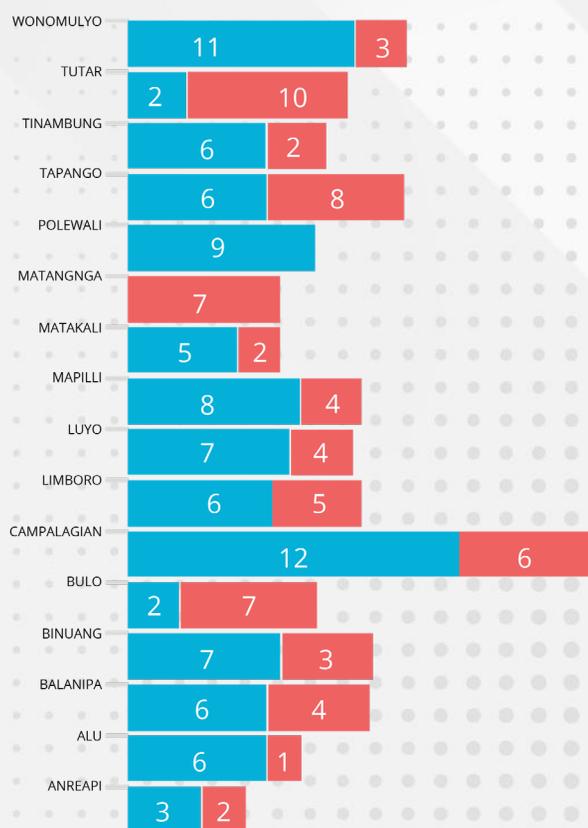
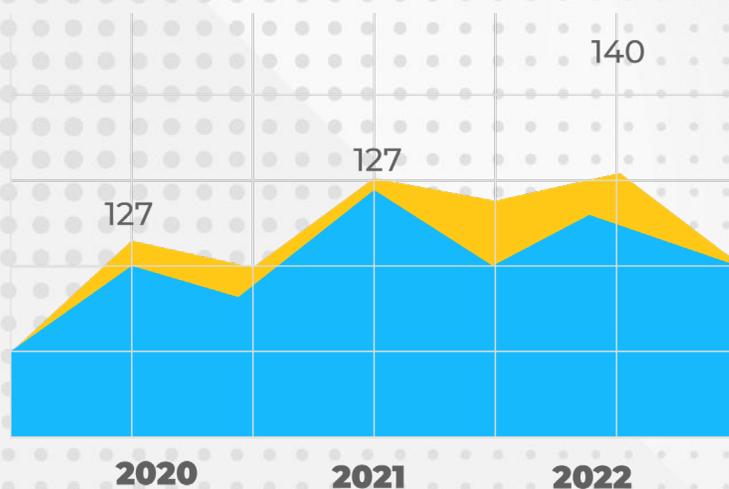
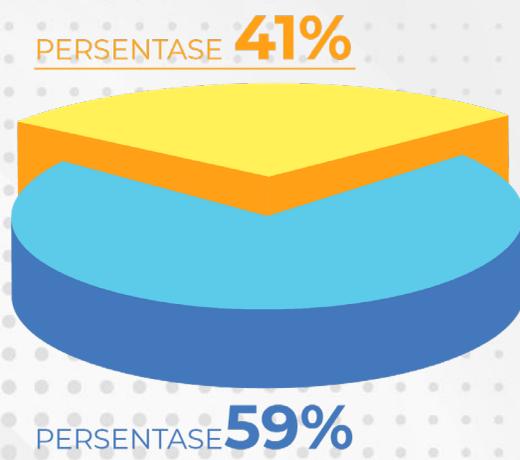


Chart 3.6
Pertumbuhan Menara Telekomunikasi Tahun 2020 s.d. 2022 dan Blankspot Desa per Kecamatan Tahun 2022



Analisis Keberhasilan dan Kegagalan

Faktor Penunjang :

1. Adanya kebijakan SPBE yang mendorong Pemerintah Pusat melalui Kementerian Lembaga turut menyediakan aplikasi terintegrasi Pusat-Daerah yang terkait dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah yang juga turut menunjang kinerja kementerian/ lembaga.
2. Berkembangnya teknologi Wifi Station Fiber Optic yang memiliki kecepatan jauh lebih baik dan aman sehingga memudahkan Perangkat Daerah dalam mengembangkan dan memanfaatkan sistem informasi manajemen.
3. Adanya monitoring, evaluasi dan penilaian penyelenggaraan SPBE yang memudahkan Pemerintah Daerah meningkatkan kualitas penyelenggaraan SPBE.

Faktor Penghambat :

1. Belum optimalnya implementasi kebijakan roadmap SPBE, arsitektur SPBE dan proses bisnis SPBE di daerah.
2. Belum terpadunya pengembangan aplikasi pemerintahan baik di tingkat Pusat maupun Daerah.
3. Belum optimalnya kinerja Dewan Pengarah SPBE (TIK) Pemerintah Daerah dalam mengoptimalkan implementasi SPBE utamanya pemantapan fungsi-fungsi pemerintahan berbasis elektronik.

Solusi :

1. Meningkatkan koordinasi dan pendampingan dengan Perangkat Daerah dalam pemetaan kebutuhan aplikasi pemerintahan serta pendampingan dalam pemanfaatan aplikasi umum berbagi pakai.
2. Meningkatkan koordinasi dengan Kementerian Kominfo, Kementerian PANRB, Kementerian Dalam Negeri dan BSSN dalam pemanfaatan aplikasi umum berbagi pakai di tingkat pemerintah daerah dan penguatan keamanan sistem informasi.
3. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan penyedia Bandwitch untuk peningkatan kualitas akses internet Perangkat Daerah.
4. Mengembangkan Pusat Data (Server Pusat) Pemerintah Daerah sesuai kebutuhan dan kemampuan anggaran.

Adapun sejumlah Program dan Kegiatan yang diselenggarakan untuk memastikan tercapainya target indikator sasaran peningkatan kualitas teknologi informasi dan persandian daerah, sebagai berikut :

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Alokasi Anggaran	Realisasi	%
Program Aplikasi Informatika	Rp. 1.385.240.100	Rp. 1.384.428.027	99,94
Pengelolaan e-Government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 1.385.240.100	Rp. 1.384.428.027	99,94
a. Pengembangan dan Pengelolaan SD TIK Pemerintah Daerah	Rp. 1.305.031.000	Rp. 1.304.355.621	99,95
b. Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Rp. 80.209.100	Rp. 80.072.406	99,83

Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Rp.	16.746.700	Rp.	16.746.700	100
Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp.	16.746.700	Rp.	16.746.700	100
a. Penyediaan Layanan Keamanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp.	16.746.700	Rp.	16.746.700	100



Gambar 3.2. Pendampingan Pemanfaatan Akun Email Polmankab.go.id dalam rangka optimalisasi pemanfaatan sertifikat elektronik dan pemanfaatan aplikasi umum SRIKANDI.



SASARAN STRATEGIS 3 :
Meningkatnya Kualitas Data Statistik Sektoral

Indikator : Persentase Data Sektoral Yang Memenuhi Standar Data dan Dapat Diakses Secara Online

Target : 77%

Tata kelola data menjadi penting seiring meningkatnya volume data dan informasi. Perkembangan teknologi dan informasi pun turut memberi pengaruh terhadap kecepatan, validitas dan penyediaan data yang up to date. Demikian pula kecepatan pengambilan keputusan dan penyusunan strategi pembangunan untuk mengatasi permasalahan dan isu strategis pemerintahan pembangunan, membutuhkan ketersediaan data yang cepat, akurat dan kekinian. Olehnya itu, Dinas KominfoSP merupakan Perangkat Daerah yang memastikan tercapainya sasaran meningkatnya kualitas data statistik daerah.

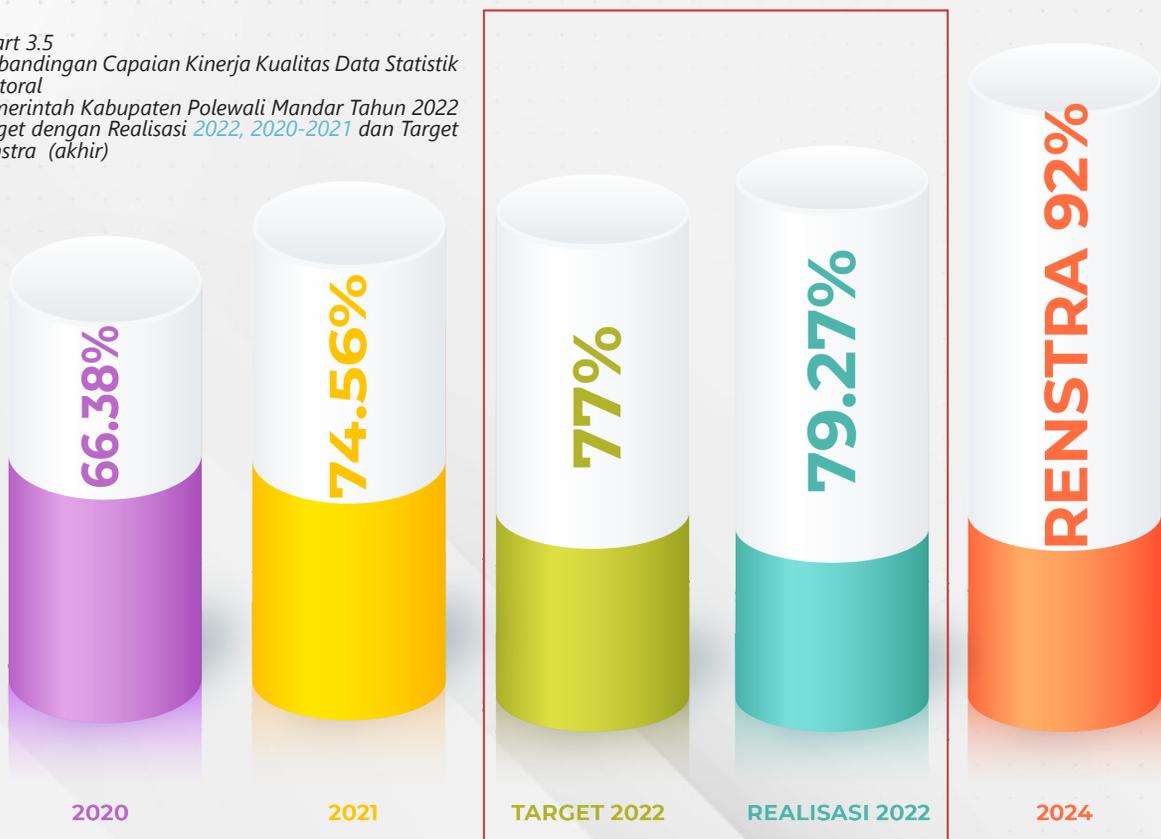
Berdasarkan hasil pengukuran tingkat capaian kinerja Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Tahun 2022 pada sasaran Strategis 3, digambarkan dalam tabel sebagai berikut :

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Meningkatnya Kualitas Data Statistik Sektoral	Persentase Data Sektoral Yang Memenuhi Standar Data dan Dapat Diakses Secara Online	77%	79,27%	102,9%

Tabel 3.5
 Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis III Tahun 2022

Adapun capaian kinerja sasaran 'Meningkatnya Kualitas Data Statistik Sektoral Tahun 2022 dan perbandingan dengan tahun – tahun sebelumnya dan target jangka menengah dapat dilihat pada Chart berikut ini :

Chart 3.5
 Perbandingan Capaian Kinerja Kualitas Data Statistik Sektoral Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2022 Target dengan Realisasi 2022, 2020-2021 dan Target Renstra (akhir)



Sumber : Bidang Statistik Dinas KominfoSP, Januari 2023



Sebagaimana capaian kinerja yang tersaji pada Chart di atas, maka diketahui bahwa Capaian Kinerja sasaran Meningkatnya Kualitas Data Statistik Sektoral dengan indikator persentase data sektoral yang memenuhi standar data dan dapat diakses secara online untuk Tahun 2022 mencapai 79,27% data valid. Valid dalam pengertian ini adalah data yang disampaikan melalui aplikasi Polman Satu Data telah memiliki kelengkapan perhitungan yang memadai dan disampaikan (diinput) oleh pejabat yang membidangi sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara kelembagaan. Kondisi capaian 79,27% ini melampaui target yang ditetapkan pada tahun 2022 yaitu 77% atau dengan capaian realisasi 102,9%. Apabila dibandingkan dengan kondisi tahun 2020 yang saat itu validitas data sektoral masih di angka 66,38%, capaian kinerja tahun 2021 juga meningkat 74,56 %.

Adanya peningkatan kapasitas SDM pengelola data, optimalnya pendampingan kepada Perangkat Daerah selaku produsen data, pemutakhiran aplikasi Polman Satu Data, terlaksananya monitoring dan evaluasi pengelolaan data sektoral serta kolaborasi dan koordinasi Pembina data, Koordinator forum satu data, walidata dan produsen data melalui forum satu data, dalam menetapkan strategi perbaikan tata Kelola data secara signifikan mempengaruhi capaian kinerja pengelolaan data sektoral.

Sedangkan untuk pencapaian target jangka menengah yang tertuang dalam Renstra Dinas KominfoSP, realisasi kinerja 2022 ini sudah mencapai 86,16 % dari target 92 % yang ditentukan tahun 2024. Adapun kondisi pemenuhan data sektoral berdasarkan urusan pemerintahan daerah, dapat diamati pada Tabel berikut ini :

Tabel 3.6
Pemenuhan Data Sektoral Organisasi Perangkat Daerah Tahun 2022

No	Urusan	Jumlah Data	Data Terinput	Data Lengkap Penunjang	%
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	95	89	67	70,53
2	Dinas Pertanian dan Pangan	101	100	100	99,01
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	38	27	22	57,89
4	Dinas Sosial	44	44	43	97,73
5	Dinas Kesehatan	74	60	56	75,68
6	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	35	25	23	65,71
7	Dinas Perumahan, Pemukiman dan Pertanahan	16	14	14	87,50
8	Dinas Penanaman Modal & PTSP	26	23	23	88,46
9	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	19	16	15	78,95
10	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata	28	28	28	100
11	Dinas Kelautan dan Perikanan	40	34	26	65,00
12	Dinas Pengendalian Penduduk, KB dan P3A	25	23	18	72,00
13	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM	23	23	23	100
14	Dinas Komunikasi, Informatika Statistik dan Persandian	36	36	36	100
15	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	38	38	38	100
16	Dinas Perhubungan	19	18	15	78,95
17	Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja & ESDM	32	30	30	93,75
18	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	31	29	19	61,29

19	Satuan Polisi Pamong Praja	25	25	22	88,00
20	Badan Penelitian Pengembangan dan Perencanaan	41	41	41	100
21	Badan Keuangan	56	46	43	76,79
22	Badan Pendapatan	41	29	23	56,10
23	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	20	16	16	80,00
24	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	17	15	15	88,24
25	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	12	10	10	83,33
26	Inspektorat	17	17	17	100,00
27	Sekretariat DPRD	18	16	15	83,33
28	Sekretariat Daerah	157	96	93	59,24
Jumlah		1124	968	891	79,27

Sumber : Bidang Statistik Dinas KominfoSP, Januari 2023

Melalui inovasi Polman Satu Data sebagai sebuah aplikasi berbasis web ini, Perangkat Daerah sebagai produsen data sektoral dapat melakukan pengelolaan data dengan lebih tertib, up to date dan valid. Publik juga dapat mengakses data sektoral ini dengan lebih mudah dan cepat dengan mengunjungi situs www.satudata.polmankab.go.id. Disisi lain, Pemerintah Daerah juga dapat melakukan monitoring dan evaluasi kinerja pengelolaan data di setiap perangkat daerah sampai dengan ke tingkat satuan kerja terkecil di setiap perangkat daerah. Hasil monitoring dan evaluasi ini kemudian ditindaklanjuti dengan langkah-langkah pembinaan,

baik berupa pemberian penghargaan Data Award setiap Tahun pada perangkat daerah dengan kinerja Pengelolaan Data Terbaik, serta melakukan upaya-upaya pendampingan perbaikan kualitas data sektoral termasuk pemberian sanksi.

Untuk meningkatkan koordinasi, komunikasi dan kesepakatan antar penyelenggara statistik sektoral terhadap kebutuhan data yang akan datang telah dilakukan pertemuan Forum Satu Data tingkat Kabupaten Polewali Mandar yang dihadiri oleh Pembina Data, Koordinator Forum Satu Data, Wali Data dan Wali Data Pendukung serta Produsen Data.

Analisis Keberhasilan dan Kegagalan

Faktor Penunjang :

- Adanya kebijakan Perpres Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia.
- Tersedianya kebijakan Pemerintah Daerah berupa Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2019 tentang Tata Kelola Data Sektoral di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar.
- Terlaksananya koordinasi dan kolaborasi Pembina data, walidata dan produsen data melalui forum satu data.
- Meningkatnya perhatian publik terhadap ketersediaan data sektoral yang memadai.

Faktor Penghambat :

- Belum meratanya komitmen Perangkat Daerah utamanya di tingkat pejabat eselon IV dalam menyediakan data yang cepat, lengkap dan dapat dipertanggung-jawabkan.
- Belum optimalnya pelaksanaan kegiatan statistik yang diperlukan pada prinsip satu data yang berkualitas yaitu : memenuhi standar data, dilengkapi dengan metadata, memenuhi kaidah interoperabilitas, menggunakan kode referensi dan data induk.
- Belum efektifnya penerapan sanksi bagi pemangku data yang tidak mampu menyediakan data sesuai standar data yang ditetapkan.

Solusi :

- Meningkatkan koordinasi dan pendampingan dengan Perangkat Daerah dalam pengelolaan data sectoral baik dalam penyediaan, pengolahan, penginputan termasuk pemanfaatan aplikasi Polman Satu Data.
- Meningkatkan kapasitas dan kualitas aplikasi Polman Satu Data.
- Menyelenggarakan pembinaan berupa monitoring, evaluasi, dan penilaian bagi Perangkat Daerah yang melakukan Pengelolaan Data Terbaik Tahun 2022.

Adapun sejumlah Program dan Kegiatan yang diselenggarakan untuk memastikan tercapainya target indikator sasaran peningkatan kualitas data sektoral, sebagai berikut:

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Alokasi Anggaran	Realisasi	%
Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Rp. 159.450.900	Rp. 159.422.100	99,98
Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 159.450.900	Rp. 159.422.100	99,98
a. Koordinasi sinkronisasi pengumpulan, pengolahan, analisis dan diseminasi data statistik sektoral	Rp. 74.087.600	Rp. 74.083.700	99,99
b. Membangun Metadata Statistik Sektoral	Rp. 85.363.300	Rp. 85.338.300	99,97



Gambar 3.3 Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kab. Polewali Mandar dirangkaikan Penganugerahan Data Award Tahun 2022



SASARAN STRATEGIS 4 :

Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Perangkat Daerah

Indikator : Predikat SAKIP Perangkat Daerah

Target : A (83)

Berdasarkan hasil pengukuran tingkat capaian kinerja Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Tahun 2022 pada sasaran Strategis 4, digambarkan dalam tabel sebagai berikut :

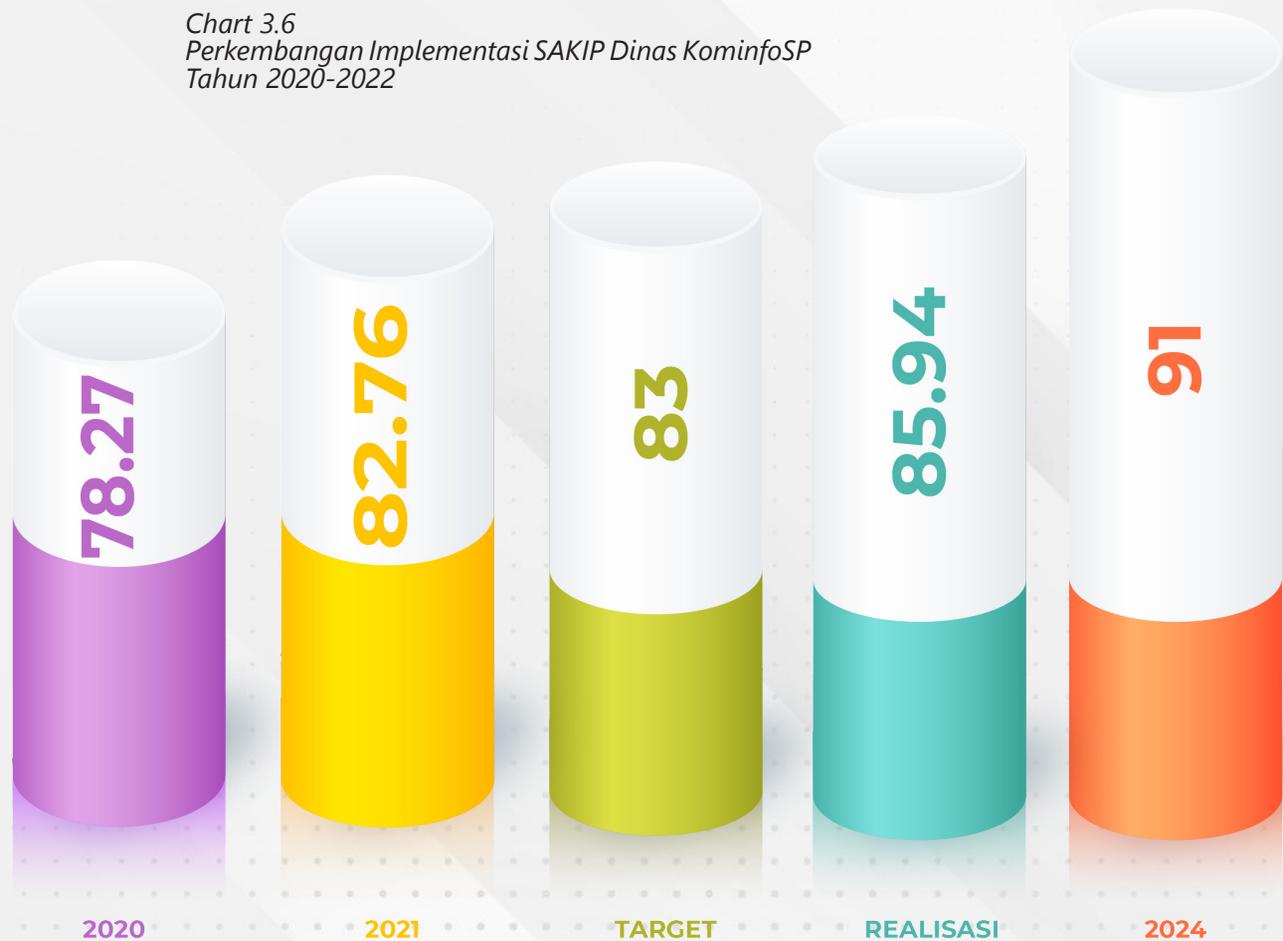
No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Perangkat Daerah	Predikat SAKIP Perangkat Daerah	A (83)	A (85,94)	103,54%

Tabel 3.7
Pengukuran Kinerja
Sasaran Strategis IV
Tahun 2022

Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah merupakan satu kesatuan dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar. Di tingkat Perangkat Daerah, juga diimplementasikan Perencanaan Kinerja berupa penyusunan Renstra, Renja, RKA, DPA, Perjanjian Kinerja dan Rencana Aksi. Demikian pula halnya dengan pengukuran kinerja, dilakukan secara berjenjang berdasarkan sasaran, indikator sasaran, dan target yang diperjanjikan. Selanjutnya pada akhir tahun dilakukan penyusunan Laporan Kinerja berupa LAKIP dan diakhiri dengan reviu oleh Inspektorat.

Komponen SAKIP	2020	2021	2022
Perencanaan Kinerja	29,7	28,80	28,80
Pengukuran Kinerja	23,13	22,19	22,19
Pelaporan Kinerja	10,31	11,86	12,31
Evaluasi Internal	4,13	5,41	8,14
Capaian Kinerja	11	14,50	14,50
NILAI	78,27	82,76	85,94
PREDIKAT	BB	A	A

Chart 3.6
Perkembangan Implementasi SAKIP Dinas KominfoSP
Tahun 2020-2022



Sumber : Sekretariat Dinas KominfoSP, Januari 2023



Mencermati perkembangan capaian implementasi SAKIP Dinas KominfoSP sebagaimana tersaji pada chart tersebut di atas, maka kualitas penerapan SAKIP Dinas KominfoSP dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yang signifikan. Predikat BB dicapai tahun 2020 (78,27%), hal ini dipengaruhi SDM yang berperan dalam pengukuran kinerja belum memadai, meski dokumen perencanaan seperti RPJMD dan Renstra Dinas KominfoSP telah dilengkapi dengan IKU yang relevan dan terukur dan telah dilakukan penjejaran (cascading) kinerja mulai dari level pimpinan sampai kepada level terkecil (Pelaksana) di unit kerja. Tahun 2021, Predikat A (82,76%) dapat dicapai signifikan dengan adanya komitmen tinggi pimpinan dalam pelaksanaan SAKIP. Hal ini turut mempengaruhi keterlibatan semua pihak pada internal Dinas, untuk meningkatkan nilai SAKIP dan bekerjasama untuk mencapai tujuan SAKIP. Capaian (85,94%) Predikat A dicapai tahun 2022 dipengaruhi komitmen pimpinan untuk menindaklanjuti LHE inspektorat, dan secara nyata berpengaruh terhadap perbaikan perencanaan, pelaksanaan program kegiatan serta pengukuran kinerja. Hal ini diwujudkan dalam evaluasi awal tahun yang terdokumentasi.

Sedangkan untuk pencapaian target jangka menengah yang tertuang dalam Renstra Dinas KominfoSP, realisasi kinerja 2021 ini sudah mencapai 94,43 % dari target 91 % yang ditentukan tahun 2024.

Analisis Keberhasilan dan Kegagalan

Faktor Penunjang :

- a. Tersedianya aplikasi e-SAKIP terintegrasi.

Faktor Penghambat :

- a. Kurangnya SDM dalam pengelolaan data kinerja.

Solusi :

- a. Peningkatan kapasitas pejabat teknis yang mengkoordinasikan penerapan SAKIP

Sejumlah Program dan Kegiatan untuk menjamin pencapaian sasaran kualitas akuntabilitas kinerja perangkat daerah ini, sebagai berikut :

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2.878.748.811	2.803.347.899	97,38
Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	27.966.500	27.966.500	100
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5.057.900	5.057.900	100
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	21.955.800	21.955.800	100
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5.096.000	5.096.000	100
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.000.200	2.638.900	100



Gambar 3.4 Apresiasi Capaian Akuntabilitas Kinerja Tahun 2021 (SAKIP Predikat A) Kepada Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian



SASARAN STRATEGIS 4 :

Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Perangkat Daerah

Indikator : Persentase Tertib Pengelolaan Keuangan dan Aset Perangkat Daerah

Target : 100%

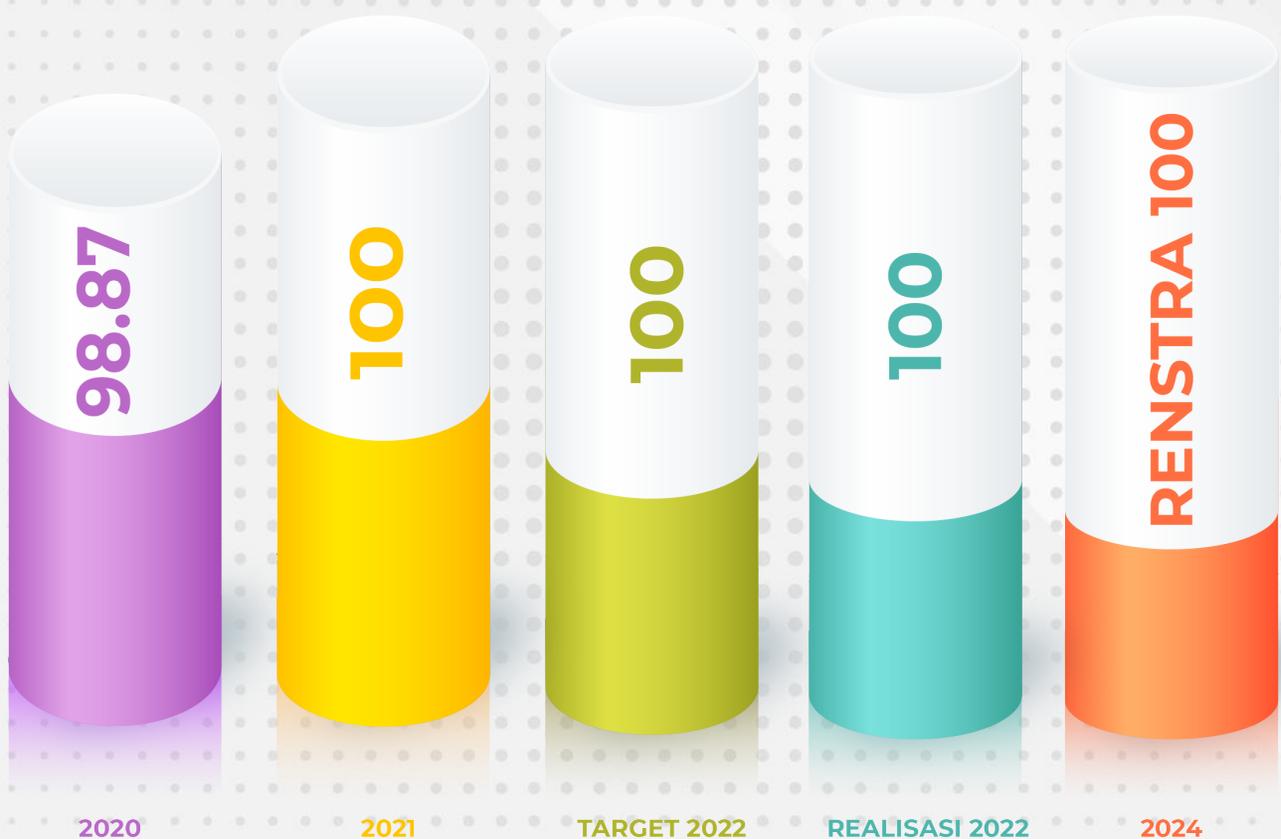
Berdasarkan hasil pengukuran tingkat capaian kinerja Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Tahun 2022 pada sasaran Strategis 4, digambarkan dalam tabel sebagai berikut :

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Perangkat Daerah	Persentase Tertib Pengelolaan Keuangan dan Aset Perangkat Daerah	100%	100%	100

Tabel 3.8
Pengukuran Kinerja
Sasaran Strategis IV
Tahun 2022

Laporan keuangan Dinas KominfoSP bertujuan menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi dan penggunaan anggaran. Pada aspek sasaran strategis ini, diharapkan Dinas KominfoSP turut menjadi bagian pencapaian Opini Pengelolaan Keuangan BPK Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Memperhatikan capaian Opini BPK dimaksud dalam 3 tahun terakhir yang selalu mencapai WTP, maka diharapkan pencapaian WTP untuk tahun anggaran 2022 ini dapat kembali mencapai WTP. Dalam hal ini Dinas KominfoSP optimis turut menjadi Perangkat Daerah yang berperan aktif dalam pencapaian Opini WTP.

Chart 3.7
Perbandingan Capaian Kinerja Pengelolaan Keuangan dan Aset Dinas KominfoSP Tahun 2022 serta Perbandingan Target dengan Realisasi 2022, 2020-2021 dan Target Renstra (akhir)





Mencermati perkembangan capaian pengelolaan keuangan dan aset Dinas KominfoSP sebagaimana tersaji pada chart 3.7 di atas, kualitas pengelolaan keuangan aset Dinas KominfoSP setiap tahunnya juga mengalami peningkatan. Pengelolaan keuangan dan aset tahun 2020, dicapai (98,87%), capaian ini dipengaruhi belum optimalnya tertib administrasi aset internal Dinas. Tahun 2021, capaian pengelolaan keuangan dan aset dicapai (100%). Hal ini dipengaruhi meningkatnya tertib administrasi aset dan peningkatan tertib administrasi keuangan dan pengarsipan. Capaian pengelolaan keuangan dan aset tahun 2022 juga dapat dicapai (100%) dengan adanya pemanfaatan aplikasi aset BMD serta aplikasi penatausahaan keuangan yang lebih mutakhir serta dukungan tinggi pimpinan dan jajaran internal dinas dalam mendukung penyelenggaraan, pengelolaan dan pelaporan keuangan dan aset BMD yang transparan dan akuntabel yang diwujudkan melalui rapat-rapat koordinasi di internal dinas yang melibatkan pimpinan dan para pengelola keuangan dan aset BMD secara intens.

Sedangkan untuk pencapaian target jangka menengah yang tertuang dalam Renstra Dinas KominfoSP, realisasi kinerja 2022 ini sudah mencapai 100 % dari target 100 % yang ditentukan tahun 2024.

Analisis Keberhasilan dan Kegagalan

Faktor Penunjang :

- Tingginya komitmen seluruh jajaran pegawai Dinas KominfoSP untuk mencapai WTP atau tidak adanya temuan kerugian negara dan penyimpangan administrasi dan sistem prosedur.
- Tersedianya aplikasi SIM Keuangan Daerah yang memudahkan tertib pengelolaan keuangan daerah.

Faktor Penghambat :

- Minimnya SDM Pengelola Keuangan.
- Minimnya SDM pengelola Asset BMD.

Solusi :

- Mengoptimalkan koordinasi dan konsultasi dengan Badan Keuangan dalam rangka penguatan akuntansi dan aset BMD.
- Peningkatan tertib administrasi keuangan dan tertib pengarsipan.



Adapun Program dan Kegiatan untuk pencapaian sasaran ini, sebagai berikut :

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2.878.748.811	2.803.347.899	97,38
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.296.133.661	2.225.841.318	96,94
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.273.132.761	2.202.840.418	96,61
Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	7.000.900	7.000.900	100
Penyusunan Laporan Keuangan Berkala	16.000.000	16.000.000	100



SASARAN STRATEGIS 4 :

Meningkatnya Kualitas Manajemen Perkantoran

Indikator : Indeks Kepuasan Masyarakat/Stakeholder

Target : Sangat Baik (97,05)

Berdasarkan hasil pengukuran tingkat capaian kinerja Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Tahun 2022 pada sasaran Strategis 4, digambarkan dalam tabel sebagai berikut :

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Meningkatnya Kualitas Teknologi Informasi dan Persandian Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat/Stakeholder	Sangat Baik (97,05)	Sangat Baik (98,79)	101,8%

Tabel 3.9
Pengukuran Kinerja
Sasaran Strategis IV
Tahun 2022

Dalam upaya memastikan tercapainya sasaran strategis Dinas KominfoSP, maka diperlukan pula pencapaian sasaran strategis pada aspek manajemen perkantoran, sehingga kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan fungsi-fungsi pelayanan publik Dinas KominfoSP semakin membaik. Terdapat 9 (sembilan) layanan Dinas KominfoSP yang telah dilakukan survey kepuasan pelayanan, sebagai berikut :

1. Layanan peliputan
2. Layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat (LAPOR)
3. Keterbukaan Informasi publik
4. Pemeliharaan jaringan TIK
5. Fasilitasi pendampingan pengelolaan aplikasi TIK
6. Fasilitasi pengelolaan website satuan kerja
7. Layanan pusat data (server) TIK
8. Layanan fasilitasi video conference
9. Layanan penyajian infografis data sektoral

Adapun capaian hasil survei pelayanan publik Dinas KominfoSP, pada tabel berikut :

No	Layanan Yang Disurvei	Layanan Peliputan	LAPOR	Keterbukaan Informasi Publik	Pemeliharaan Jaringan TIK	NILAI SURVEI				Jumlah	
						Fasilitasi Pendampingan Pengelolaan Aplikasi TIK	Fasilitasi Pengelolaan Website Satuan Kerja	Layanan Pusat Data (Server) TIK	Layanan Fasilitasi Video Conference		Layanan Penyajian Infografis Data Sektoral
1	Persyaratan	100	97,22	96,43	99,00	98,59	100	100	100	95,89	98,57
2	Prosedur	100	94,44	92,86	99,33	98,36	99,00	100	100	97,45	97,94
3	Waktu Pelayanan	100	97,22	99,11	99,33	98,93	99,00	100	100	98,93	99,17
4	Biaya Tarif	100	94,44	99,11	100	98,75	99,00	100	100	99,48	98,98
5	Produk Layanan	100	97,19	98,21	99,67	98,98	100	100	100	94,86	98,77
6	Kompetensi Pelaksana	100	97,22	99,11	99,67	94,54	99	100	100	98,25	99,31
7	Perilaku Pelaksana	100	100	100	100	97,73	99	100	100	99,57	99,35
8	Penanganan Pengaduan, Sarana dan Masukan	100	97,22	96,43	99,67	98,36	99	100	100	95,43	98,43
9	Sarana dan Prasarana	100	97,22	95,54	99,33	96,11	99	100	100	97,95	98,60
						Nilai rata-rata Kepuasan Pengguna Layanan					98,79%
	Rata-rata IK						98,79				
						Predikat Kinerja Layanan					
				Tidak Baik		Kurang Baik		Baik		Sangat Baik	
				25 – 43,75		43,76 – 62,50		62,51 – 81,25		97,04 - 100	

Tabel 3.10
Hasil Survei Kepuasan Pelayanan Dinas KominfoSP Tahun 2022

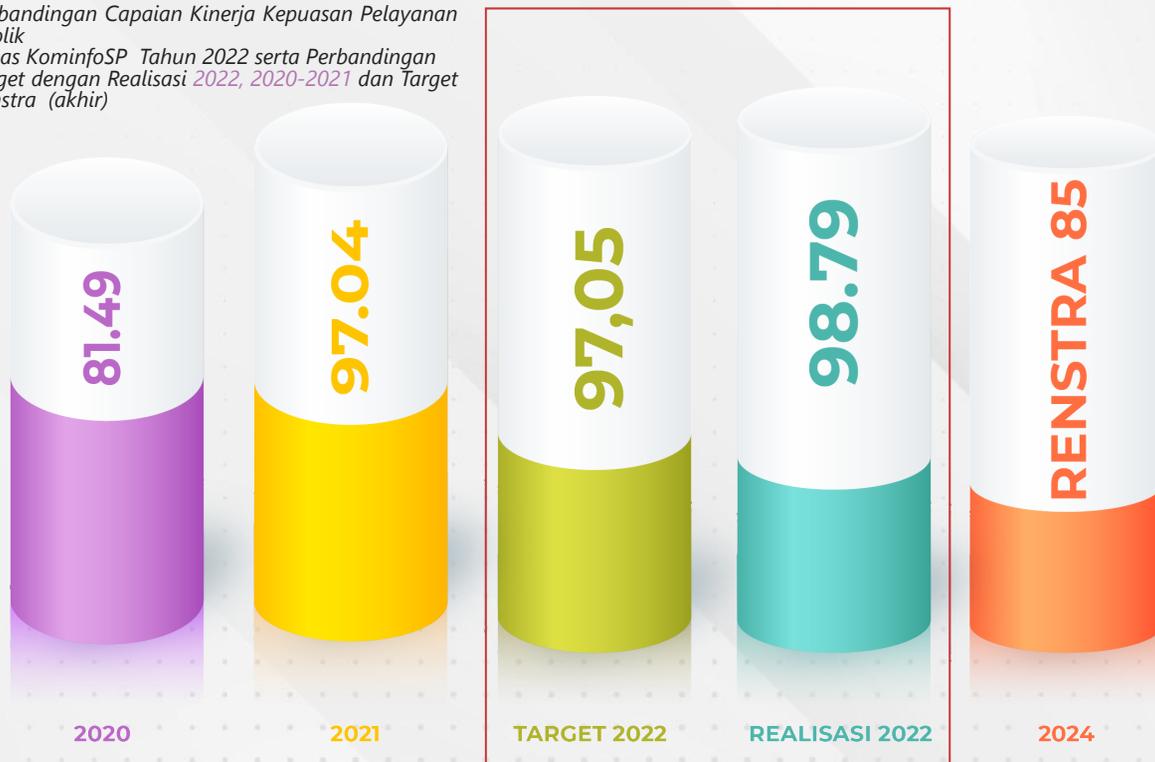
Mencermati Tabel dan Chart terkait survei kepuasan layanan tersebut, maka dapat diketahui bahwa tingkat kepuasan masyarakat/ stakeholders atas 9 jenis layanan Dinas KominfoSP dari tahun ke tahun mengalami peningkatan berarti. Tahun 2020, nilai rata-rata survei kepuasan layanan (81,49%) predikat sangat baik. Kondisi ini didukung adanya kemudahan prosedur layanan serta dukungan internal dinas yang berkomitmen memberikan layanan terbaik. Selanjutnya capaian kinerja kepuasan pelayanan publik pada tahun 2021 mengalami peningkatan sangat signifikan dibandingkan tahun 2020 dengan predikat sangat baik, indeks (97,04%). Adanya dukungan teknologi informasi aplikasi e-survey kepuasan, kemudahan

mengakses layanan serta kecepatan merespon layanan sangat berpengaruh nyata terhadap tingkat kepuasan pengguna layanan. Predikat sangat baik, indeks kepuasan layanan (98,79%), Kembali dapat dicapai tahun 2022. Pengembangan aplikasi e-survey yang semakin mutakhir serta adanya peningkatan kualitas di semua unsur layanan, menjadi factor yang mempengaruhi tingkat kepuasan pengguna layanan.

Sedangkan untuk pencapaian target jangka menengah yang tertuang dalam Renstra Dinas KominfoSP, realisasi kinerja 2022 ini sudah mencapai 116,2 % dari target 85% yang ditentukan tahun 2024.

Chart 3.8
Perbandingan Capaian Kinerja Kepuasan Pelayanan Publik Dinas KominfoSP Tahun 2022 serta Perbandingan Target dengan Realisasi 2022, 2020-2021 dan Target Renstra (akhir)

Sumber : Sekretariat Dinas KominfoSP, Januari 2023



Analisis Keberhasilan dan Kegagalan

Faktor Penunjang :

- Tingginya motivasi kerja Pegawai.
- Adanya perkembangan teknologi dan informasi.
- Meningkatnya perhatian perangkat daerah terhadap layanan yang disediakan Dinas KominfoSP

Faktor Penghambat :

- Kondisi Bangunan Gedung Kantor yang sebagian dalam kondisi kurang layak.
- Terbatasnya kelengkapan sarana prasarana pelayanan.

Solusi :

- Penataan ruang front office dan ruang kerja pegawai.
- Optimalisasi pemeliharaan dan penyediaan sarana prasarana kerja.

Sejumlah Program dan Kegiatan yang dialokasikan untuk memastikan terjaminnya pelayanan publik yang berkualitas, sebagai berikut :

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Alokasi Anggaran	Realisasi	%
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2.878.748.811	2.803.347.899	97,38
Administrasi BMD Pada Perangkat Daerah			
Penatausahaan BMD Pada SKPD	1.630.000	1.630.000	100
Administrasi Umum Perangkat Daerah			
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.096.600	1.096.600	100
Penyediaan Peralatan Perlengkapan Kantor	8.132.200	8.132.200	100
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1.596.900	1.596.900	100
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	39.030.000	39.030.000	100
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	22.924.800	22.924.800	100
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.880.000	2.850.000	98,96
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	155.889.800	155.869.950	99,99
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	21.881.600	21.881.600	100
Pengadaan BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	139.039.300	136.213.700	97,97
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	44.400.000	44.400.000	100
Penyediaan Jasa Komunikasi SDA dan Listrik	39.890.750	37.654.031	94,39
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	28.014.600	28.014.600	100
Pemeliharaan BMD Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	14.068.700	14.068.700	100
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10.030.000	10.030.000	100
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	15.000.000	15.000.000	100



Gambar 3.5. Apresiasi Capaian Pelayanan Publik Tahun 2021 (Predikat Sangat Baik) Kepada Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian

B. Akuntabilitas Keuangan

Akuntabilitas keuangan merupakan pertanggungjawaban mengenai integritas keuangan dan ketaatan terhadap peraturan perundangan dalam penggunaan sumber daya finansial. Laporan akuntabilitas kinerja yang baik harus disertai pula laporan akuntabilitas keuangan, sehingga efisiensi dan efektifitas penganggaran dapat diukur serta dapat diketahui nilai manfaat dari hasil program dan kegiatan yang dilaksanakan. Adapun Alokasi dan Realisasi Belanja Dinas KominfoSP, dapat disajikan sebagai berikut:



2022

Chart 3.9
Alokasi dan Realisasi Anggaran Dinas KominfoSP
Tahun 2021

Untuk mengetahui akuntabilitas keuangan terhadap kinerja yang dihasilkan pada tahun 2022, maka dapat diamati melalui Tabel berikut :

No	Sasaran Strategis dan Indikator	Target	Realisasi	%	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	%	% Efisiensi	Keterangan
1	Meningkatnya Kualitas Keterbukaan Informasi Publik	88	92,38	104,9%	Rp 391.285.100	Rp 391.149.998	99,97	4,93	Program Informasi dan Komunikasi Publik
	Predikat Keterbukaan Informasi Publik								
2	Meningkatnya Kapabilitas Proses dan Fungsi Teknis Pemerintahan Berbasis Elektronik	3	3,71	123,6%	Rp 1.401.986.800	Rp 1.401.174.727	99,94	23,6	Program Aplikasi Informatika
	Tingkat Kematangan Kapabilitas Proses dan Fungsi Teknis SPBE								
3	Meningkatnya Kualitas Data Statistik Sektoral	77	79,27,	102,9%	Rp 159.450.900	Rp 159.422.100	99,98	2,92	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral
	Persentase Data Sektoral Yang Memenuhi Standar Data dan Dapat Diakses Secara Online								
4	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	83	85,94	103,5%	Rp 37.109.900	Rp 37.109.900	100	3,5	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
	Predikat SAKIP Perangkat Daerah								
	Persentase Tertib Pengelolaan Keuangan dan Aset Perangkat Daerah								
	Indeks Kepuasan Masyarakat/Stakeholder	97	98,79	101,7%	Rp 2.817.008.011	Rp 2.741.607.099	97,32	4,48	
JUMLAH				106,11	Rp 4.831.471.611	Rp 4.755.094.724	98,42	6,57	

Tabel 3.11
Nilai Efisiensi pada Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Dinas KominfoSP Tahun 2022

Mencermati rata-rata realisasi kinerja Dinas KominfoSP Tahun 2022 sebesar 106,11%, maka hal ini menunjukkan terjadinya efisiensi penggunaan dana sebesar 6,57%. Penggunaan Anggaran yang terealisasi 98,42% telah mampu menghasilkan rata-rata kinerja 106,11%.

Efisiensi adalah suatu ukuran keberhasilan suatu kegiatan yang dinilai yang dinilai berdasarkan besarnya biaya/ sumber daya yang digunakan untuk mencapai hasil yang diinginkan.

Dalam hal ini, semakin sedikit sumber daya yang digunakan untuk mencapai hasil yang diharapkan maka prosesnya dapat dikatakan semakin efisien.

Analisis efisiensi penggunaan sumber daya Dinas KominfoSP Tahun 2022, dilakukan membandingkan antara ketercapaian target kinerja dengan anggaran yang digunakan. Mencermati tabel nilai efisiensi pada akuntabilitas kinerja di atas, secara umum dapat disimpulkan bahwa penggunaan sumber daya Dinas KominfoSP tahun 2022 adalah **efisien**, karena seluruh realisasi kinerja **terealisasi melebihi target (kinerja 106,11%)** dengan realisasi anggaran **98,42%**.

Adapun upaya yang dilakukan oleh Dinas KominfoSP sehingga efisiensi sumber daya tahun 2022 dapat dilakukan, antara lain :

1. Komitmen pimpinan untuk mengoptimalkan sumber daya yang ada, baik fisik maupun keuangan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
2. Terbangunnya pemahaman di seluruh level internal Dinas, terkait target kinerja yang harus dicapai, dengan menghasilkan kinerja berorientasi hasil yang berdaya guna.
3. Adanya pembagian kerja yang nyata dan jelas di setiap unit kerja, yang hasilnya dapat dipertanggungjawabkan dan direview secara berkala oleh pimpinan.



BAB 4 PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Polewali Mandar menyajikan capaian sasaran strategis Dinas Tahun 2022. Di dalam penyajian ini diuraikan realisasi kinerja yang dibandingkan dengan target yang telah diperjanjikan, dibandingkan dengan kinerja tahun-tahun sebelumnya serta perbandingan dengan target

jangka menengah (tahun 2024) yang tertuang di dalam dokumen Renstra 2019-2024. Selanjutnya diuraikan pula faktor penunjang keberhasilan, kendala yang masih dihadapi serta alternative solusi yang telah diupayakan. Laporan ini tentu dilengkapi pula dengan uraian akuntabilitas keuangan dan nilai efisiensi yang mampu dicapai atas kinerja yang dicapai.

Capaian kinerja Dinas KominfoSP Tahun 2022, secara keseluruhan dapat dinyatakan **"berhasil"**. Hal ini ditunjukkan dengan Rata-rata pencapaian kinerja sasaran strategis Dinas KominfoSP sebesar **106,11%** serta capaian kinerja keuangan sebesar **98,42%**. Kondisi ini memperlihatkan Dinas KominfoSP berhasil melakukan efisiensi penggunaan dana sebesar **6,57%**.

Namun, tidak dipungkiri masih dijumpai sejumlah kendala yang perlu menjadi perhatian utama pada kinerja tahun-tahun selanjutnya yaitu, pada :

- Pengelolaan Keterbukaan Informasi Publik, melalui aplikasi e-PPID dan pengelolaan Website Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah;
- Pengelolaan Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR) melalui koordinasi dan sinergi dengan perangkat daerah dalam merespon dan menindaklanjuti aduan dan aspirasi masyarakat;
- Peningkatan kualitas infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi Pemerintah Daerah melalui pengembangan dan pemanfaatan aplikasi umum berbagi pakai dan aplikasi khusus serta pengembangan Server Pusat Pemerintah Daerah untuk perbaikan tata kelola pemerintahan berbasis elektronik dan pelayanan publik;
- Peningkatan keamanan informasi melalui pemanfaatan tanda tangan digital serta kerjasama dengan BSSN untuk kelayakan keamanan informasi sistem elektronik pemerintah daerah;
- Peningkatan koordinasi dan pemberdayaan pengelolaan data sektoral di seluruh Perangkat Daerah untuk menghasilkan data yang lebih berkualitas, baik dalam aspek validitas, kekinian, ketepatan, kelengkapan serta kemudahan pemanfaatan Polman Satu Data.

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2022 ini disusun, untuk bahan evaluasi dan perbaikan kinerja selanjutnya.



Kepala Dinas Kominfo SP

Tri Sumadana

Tri Sumadana, AP., M.Si



DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA
STATISTIK PERSANDIAN